

**LAMPIRAN**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN**

**NOMOR           TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029**



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2025 - 2029**



# Rencana Strategis RENSTRA

**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**2025 - 2029**

## DAFTAR ISI

Daftar isi		i
Daftar Tabel		ii
Daftar Gambar		ii
Kata Pengantar		iii
BAB. I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH	13
	2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah	13
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah	39
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
	3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah	50
	3.2 Startegi dan Arah Kebijakan	54
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
	4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	59
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	96
BAB V	PENUTUP	99



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	22
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	24
Tabel 2.3	Teknik menyimpulkan Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	45
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	53
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030	55
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030	56
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029	57
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029	63
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	79
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	93
Tabel 4.4	Dikungan Pelaksanaan Program Pro Rakyat	94
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah	96
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah	97

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	15
Gambar 2	Struktur Organisasi Asisten I	16
Gambar 3	Struktur Organisasi Asisten II	16
Gambar 4	Struktur Organisasi Asisten III	17



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 - 2029. Dalam rangka mengemban visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 tahun ke depan, yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dan masyarakat guna pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai instansi yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dituntut untuk dapat melakukan perubahan secara proaktif kearah perbaikan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) ini maka Sekretariat Daerah mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan kedepan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kinerja, penetapan kinerja, pelaksanaan tugas, pengendalian kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah, Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya Renstra ini, akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu 2025-2029. Sehingga target yang telah dirumuskan dan disepakati dapat tercapai selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Painan, 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**MAWARDI ROSKA, S.IP**  
Pembina Utama Madya - IV/d  
NIP. 19670907 198902 1 001





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang


Pelimpahan kewenangan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih baik dalam menetapkan arah dan tujuan pembangunannya. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah perlu adanya suatu sistem yang terencana dan berkesinambungan serta berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Governance* seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan dan terencana melalui proses perubahan untuk mewujudkan kondisi ideal. Proses-proses tersebut merupakan tahapan pembangunan yang merupakan upaya perubahan ke arah yang lebih baik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing. Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi secara optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan juga instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Dalam melaksanakan proses pembangunan yang berkelanjutan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan wajib menyusun dan menetapkan arah kebijakan dan tujuan selama 5 (lima) tahun ke depan yang




diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Perencanaan strategis yang dibuat merupakan proses yang berorientasi pada hasil (*output*) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada.


Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah minimal memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah baik dengan Peraturan Kepala Daerah maupun Peraturan Daerah.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**


Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan merujuk pada sejumlah regulasi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- 
- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- 
- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
  8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- 
- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

- 
- Inventarisasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur  
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238);
  30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ..... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
  32. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 061/489/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
  33. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 000.7.2.2/21/Bapedalitbang/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan dan Penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2025-2029 ini dimaksudkan untuk :

- 1) Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dalam RPJMD dan Penetapan Indikator RPJMD yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2) Disusun sebagai acuan resmi bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun Rencana Kerja tiap tahunnya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Menentukan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah.
- 2) Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistim pemerintahan daerah dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja.
- 3) Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4) Adanya kontribusi Sekretariat Daerah bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**


Penyajian dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) bab atau bagian, dengan berpedoman kepada Ranperbup Renstra 2025-2029, yaitu :

#### **Bab I Pendahuluan**

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai :

- 1.1. Latar Belakang





Mengemukakan secara ringkas definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta disusun dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun 2025-2029

1.4. Sistematika Penulisan.


Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkasan tentang masing-masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

## **Bab II    Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1.    Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah



Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

#### 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

#### 2.1.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya).

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis.


#### 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

#### 2.2.1. Permasalahan

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan Pelayanan



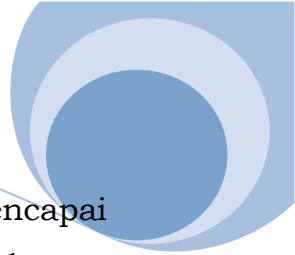
Perangkat Daerah, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Rumusan Permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan bersifat dominan. Permasalahan data-data agar disajikan ringkas tanpa menyajikan yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.

#### 2.2.2. Isu Strategis

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (Isu global, nasional, dan Regional) yang dapat mempengaruhi perangkat daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu Strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, Laporan Resmi dari lembaga pemerintah/lembaga 2025-2029, ataupun luar negeri, laporan KLHS RPJMD hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

### **Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah  
Dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan  
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
  - 3.2.1. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029  
Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam



menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahaunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

3.2.2. Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran renstra Perangkat daerah

#### **Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan hasil Cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output
- b. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutahirannya.
- c. Dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030

4.1.1. Program Pro Rakyat (Program Unggulan Bupati - Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2029)

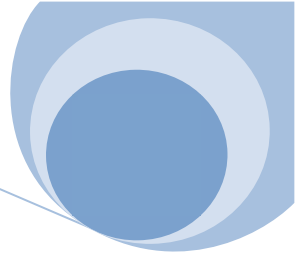
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Perangkat Daerah)

4.2.2. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah (IKK Perangkat Daerah)

## **Bab V Penutup**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN**  
**ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH**

**2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**

**2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**

Struktur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

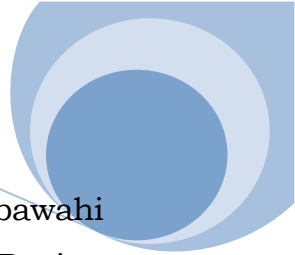
Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan. Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati/Wakil Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Untuk menunjang tugas pokok, Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi berdasarkan Tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 158 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada struktur organisasi, maka pelaksanaan tugas pokok tersebut dilaksanakan oleh Bagian-bagian yang dikelompokkan menjadi tiga (3) Asisten yaitu :



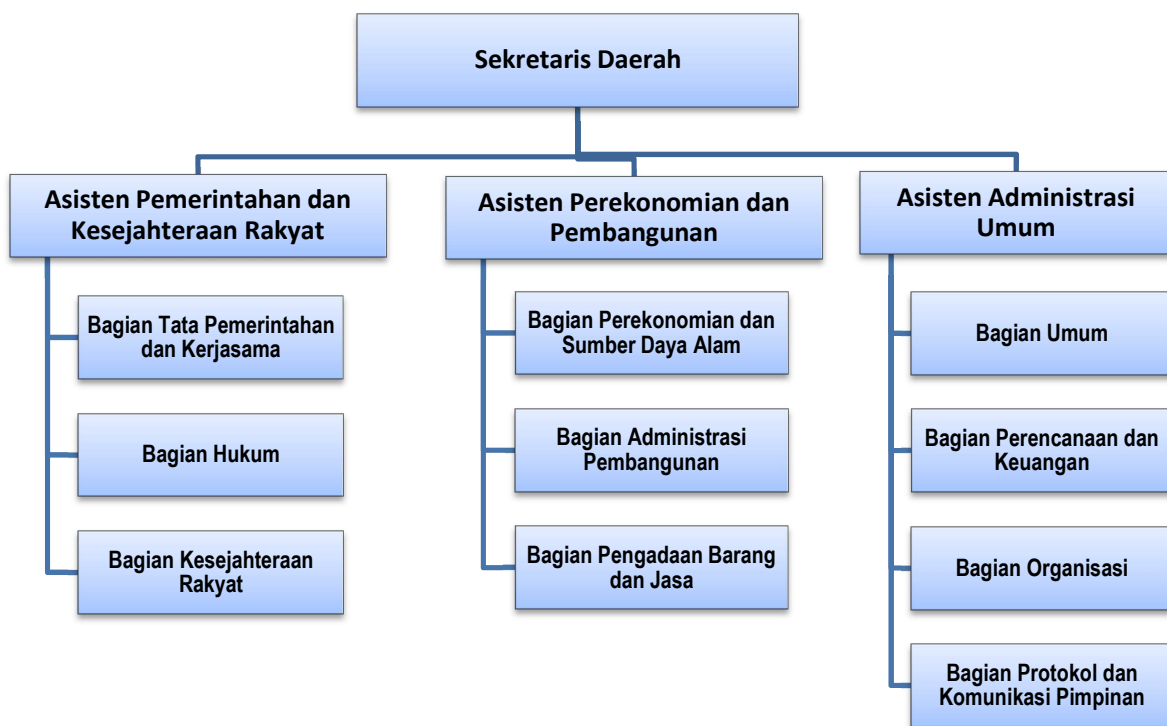
- 
- a. **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** yang membawahi Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama.
  - b. **Asisten Perekonomian dan Pembangunan** yang membawahi Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam.
  - c. **Asisten Administrasi Umum** yang membawahi Bagian Organisasi, Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Perencanaan Keuangan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Sekretaris Daerah dibantu tiga Asisten yaitu: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum. Masing masing asisten membawahi bagian-bagian sebagaimana tergambar dalam bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah yang dibagi menurut Asisten Masing-masing. Bagian-bagian yang berada di Sekretariat Daerah:

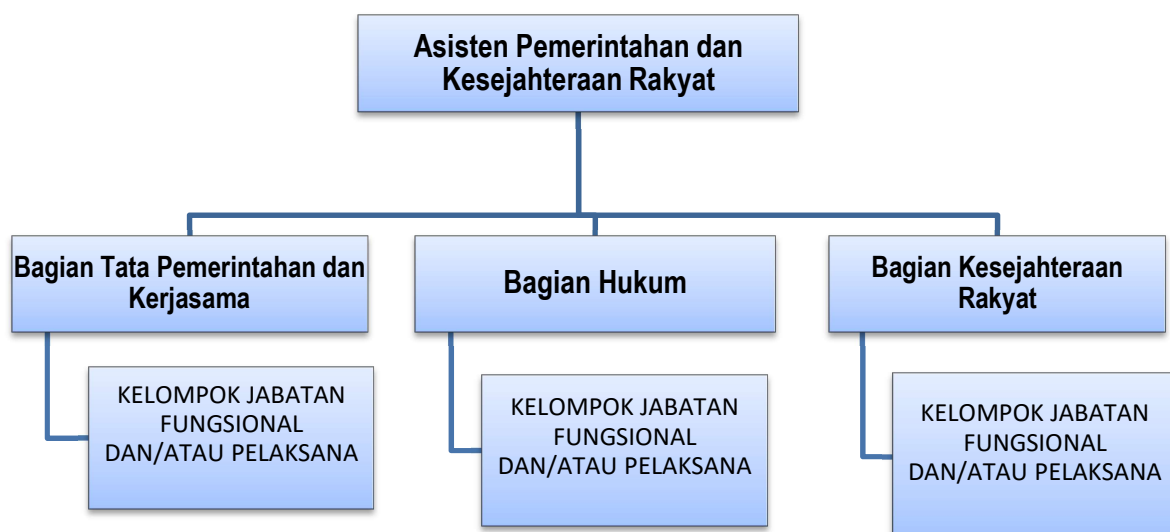
- a. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- c. Bagian Hukum

- d. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- e. Bagian Administrasi Pembangunan
- f. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- g. Bagian Umum
- h. Bagian Organisasi
- i. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- j. Bagian Perencanaan dan Keuangan

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Sekretariat Daerah**



**Gambar 2**  
**Struktur Organisasi Asisten I**



**Gambar 3**  
**Struktur Organisasi Asisten II**



**Gambar 4**  
**Struktur Organisasi Asisten III**



### 2.1.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sumber daya manusia di Sekretariat Daerah cukup memadai. Namun demikian dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan, mengingat tugas-tugas dimasa yang akan datang akan lebih berat, terutama dalam rangka menjalankan tugas pokok sebagai koordinator, perumus kebijakan, dan pelaksana pengendalian pembangunan.

Kondisi Kepegawaian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada awal 2025 sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) orang, dengan rincian dapat dilihat dari berbagai pendekatan sebagaimana tergambar dalam table-tabel berikut antara lain :

#### **JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BERDASARKAN GOLONGAN**

No	UNIT KERJA	JML						Jumlah
		Non PNS	PPPK	I	II	III	IV	
1.	Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten			-	-	-	8	8
2.	Bag. Tata Pemerintahan dan Kerjasama	2		-	-	3	2	5
3.	Bag. Kesra	2	1	-	-	4	2	6
4.	Bag. Hukum	1		-	-	5	2	7
5.	Bag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam	3	1	-	1	1	2	4
6.	Bag. Administrasi Pembangunan			-	1	5	3	9
7.	Bag. Pengadaan Barang	2	2	-	1	15	1	17

No	UNIT KERJA	JML						Jumlah
		Non PNS	PPPK	I	II	III	IV	
	dan Jasa							
8.	Bag. Umum	31	8	-	6	8	1	15
9.	Bag. Organisasi	1		-	1	6	1	8
10.	Bagian Perencanaan dan Keuangan			-		10	1	11
11.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3	2	-	3	3	1	7
	<b>JUMLAH</b>	<b>45</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>60</b>	<b>24</b>	<b>97</b>

**JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
BERDASARKAN PENDIDIKAN**

No	UNIT KERJA	TK. PENDIDIKAN				JUMLAH
		SMA	D3	S I	S II	
1.	Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten	-	-	1	7	8
2.	Bag. Tata Pemerintahan dan Kerjasama	-	-	3	2	5
3.	Bag. Kesra	-	-	3	3	6
4.	Bag. Hukum	-	-	5	2	7
5.	Bag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1	-	1	2	4
6.	Bag. Administrasi Pembangunan	1	1	3	4	9
7.	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	-	2	12	3	17
8.	Bag. Umum	7	1	5	2	15
9.	Bag. Organisasi	1	-	4	3	8
10.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	1	7	2	11
11.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	1	2	3	7
	<b>JUMLAH</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>46</b>	<b>33</b>	<b>97</b>

Pada tahun 2025 untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan didukung dengan sarana dan Prasarana sebagai berikut :

**SARANA DAN PRASARANA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Kode Barang						Nama Barang	Jumlah
1						2	3
1						ASET	2.489
1	3					ASET TETAP	2.489
1	3	2				PERALATAN DAN MESIN	2.489
1	3	2	01			ALAT BESAR	27
1	3	2	01	03		ALAT BANTU	27
1	3	2	01	03	05	POMPA	27

1	3	2	02			ALAT ANGKUTAN	80
1	3	2	02	01		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	75
1	3	2	02	01	02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	28
1	3	2	02	01	04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	47
1	3	2	02	02		ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	5
1	3	2	02	02	01	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	1
1	3	2	02	02	02	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	4
1	3	2	03			ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	5
1	3	2	03	03		ALAT UKUR	5
1	3	2	03	03	01	ALAT UKUR UNIVERSAL	5
1	3	2	04			ALAT PERTANIAN	21
1	3	2	04	01		ALAT PENGOLAHAN	21
1	3	2	04	01	04	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	21
1	3	2	05			ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.981
1	3	2	05	01		ALAT KANTOR	382
1	3	2	05	01	01	MESIN KETIK	1
1	3	2	05	01	02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	1
1	3	2	05	01	03	ALAT REPRODUKSI (PENGKANDAAAN)	1
1	3	2	05	01	04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	137
1	3	2	05	01	05	ALAT KANTOR LAINNYA	242
1	3	2	05	02		ALAT RUMAH TANGGA	1.552
1	3	2	05	02	01	MEUBELAIR	545
1	3	2	05	02	02	ALAT PENGUKUR WAKTU	5
1	3	2	05	02	03	ALAT PEMBERSIH	19
1	3	2	05	02	04	ALAT PENDINGIN	189
1	3	2	05	02	05	ALAT DAPUR	303
1	3	2	05	02	06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	478
1	3	2	05	02	07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	13
1	3	2	05	03		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	47
1	3	2	05	03	01	MEJA KERJA PEJABAT	2
1	3	2	05	03	02	MEJA RAPAT PEJABAT	4
1	3	2	05	03	03	KURSI KERJA PEJABAT	20
1	3	2	05	03	07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	21
1	3	2	06			ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	65
1	3	2	06	01		ALAT STUDIO	57
1	3	2	06	01	01	PERALATAN STUDIO AUDIO	33
1	3	2	06	01	02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	24
1	3	2	06	02		ALAT KOMUNIKASI	8
1	3	2	06	02	01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	5
1	3	2	06	02	06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	2
1	3	2	06	02	07	ALAT-ALAT SANDI	1
1	3	2	07			ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	8
1	3	2	07	01		ALAT KEDOKTERAN	4
1	3	2	07	01	01	ALAT KEDOKTERAN UMUM	1
1	3	2	07	01	21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	3
1	3	2	07	02		ALAT KESEHATAN UMUM	4
1	3	2	07	02	04	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	4
1	3	2	08			ALAT LABORATORIUM	65
1	3	2	08	01		UNIT ALAT LABORATORIUM	20
1	3	2	08	01	12	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	14
1	3	2	08	01	18	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	5
1	3	2	08	01	41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	1
1	3	2	08	03		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	11
1	3	2	08	03	10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	2
1	3	2	08	03	11	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	8
1	3	2	08	03	12	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	1

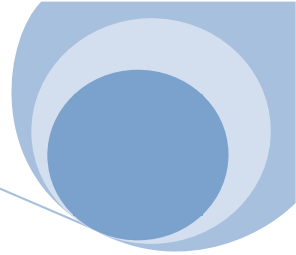
1	3	2	08	04		ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	34
1	3	2	08	04	05	SYSTEM/POWER SUPPLY	34
1	3	2	09			ALAT PERSENJATAAN	2
1	3	2	09	02		PERSENJATAAN NON SENJATA API	2
1	3	2	09	02	01	ALAT KEAMANAN	2
1	3	2	10			KOMPUTER	233
1	3	2	10	01		KOMPUTER UNIT	114
1	3	2	10	01	01	KOMPUTER JARINGAN	1
1	3	2	10	01	02	PERSONAL KOMPUTER	113
1	3	2	10	02		PERALATAN KOMPUTER	119
1	3	2	10	02	01	PERALATAN MAINFRAME	3
1	3	2	10	02	02	PERALATAN MINI KOMPUTER	2
1	3	2	10	02	03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	89
1	3	2	10	02	04	PERALATAN JARINGAN	25
1	3	2	18			RAMBU – RAMBU	1
1	3	2	18	01		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1
1	3	2	18	01	02	RAMBU TIDAK BERSUAR	1
1	3	2	19			PERALATAN OLAH RAGA	1
1	3	2	19	01		PERALATAN OLAH RAGA	1
1	3	2	19	01	03	PERALATAN SENAM	1

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Terlaksanakannya tugas-tugas pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya. Karena itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi dan berdisiplin dengan disertai pula adanya peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya aparaturnya.

Kompetensi yang dimaksud adalah berkenaan dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan, meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sangatlah penting dilakukan, mengingat dalam era otonomi daerah sekarang ini menuntut akan profesionalisme pegawai dalam memahami isu strategis untuk dapat merumuskan kebijakan yang sinergis, seiring dengan semakin meningkatnya Sumber Daya masyarakat yang tentunya akan berdampak pada tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan itupun tergantung juga pada sarana dan prasarana yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

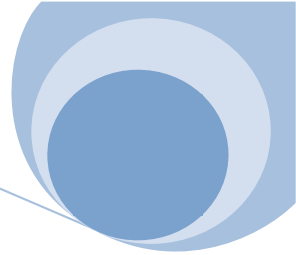
Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2021 - 2026 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2021-2026 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut:



**TABEL 2.1**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik oleh Ombusman				93,09 (Zona Hijau) A (Kualitas Tertinggi)	54,73 (Zona Kuning) C (Kualitas Sedang)	80,71 (Zona Hijau) B (Kualitas Tinggi)	79,33 (Zona Hijau) B (Kualitas Tinggi)	92,70 (Zona Hijau) A (Kualitas Tertinggi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi (%)				70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan (%)				70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah				B (66,88)	B (68,72)	B (68,97)	B (69,21)	B (68,94)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Nilai LPPD				Nilai Tidak Keluar	2,38	3,0022	Hasil Belum Keluar	Hasil Belum Keluar		100%	100%				100%	100%		
7	Peringkat MTQ tingkat provinsi				-	16 Besar	-	14 Besar	-		100%		100%			100%		100%	
8	Persentase TPQ Aktif (%)				100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Indeks Kepuasan Masyarakat				N/A	83,65 (Baik)	82,65 (Baik)	87,48 (Baik)	91,49 (Sangat Baik)		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
10	Persentase Masjid yang memiliki TPQ aktif (%)				100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase potensi zakat yang dikelola BAZ				100	100	100	67,20%	73,01%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





	(%)																		
12	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang di bawa ketahui berikutnya yang ditandatangani pada				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a										
13	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif				19	85.79	85.79	85,8	93,4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan				30.78	17.05	17.05	53,6	45,1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan				99.82	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah				100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

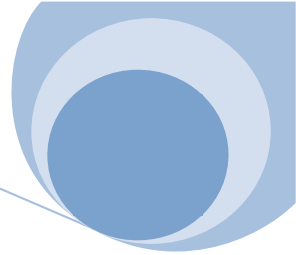
Indikator yang belum tercapai antara lain :

1. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
2. Nilai OPD yang pengelolaan Pelayanan Publik baik

Faktornya antara lain :

1. Keterbatasannya Anggaran
2. Laporan yang diberikan tidak tepat waktu, sehingga menyulitkan untuk membuat laporan terkini sebagai bahan evaluasi pekerjaan.

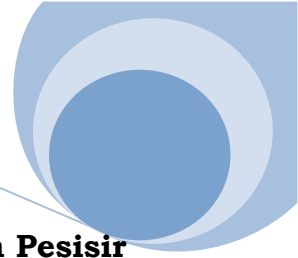




**TABEL 2.2**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

URAIAN	ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SETDA	24.816.713.699,22	31.095.565.181	33.925.717.877	30.823.861.149	29.067.728.420	23.837.487.664,00	30.476.888.469	32.181.238.464	28.652.395.158	27.502.777.913	96,05	98,01	94,86	92,96	94,62	4,77	16,3





#### 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

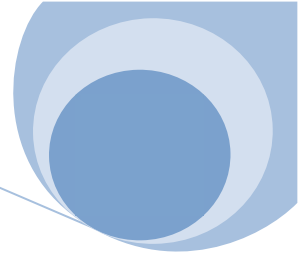
Kelompok sasaran layanan perangkat daerah adalah pihak yang menjadi penerima manfaat langsung dari program dan kegiatan yang dijalankan oleh perangkat daerah. Mereka adalah individu, kelompok, atau organisasi yang menjadi target utama dari layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, kelompok sasaran pelayanan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada table berikut

**Tabel 2.1.4.1**

**Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat Daerah**

No.	Indikator Kinerja	Uraian Pelayanan	Kelompok Sasaran Pelayanan	Keterangan
1.	Persentase Capaian kinerja SPM	Pelayanan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi dan pendampingan terhadap penerapan SPM	OPD Kabupaten (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Perkimtam, Dinas Sosial, dan Satpol PP dan BPBD)	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
2.	Nilai Evaluasi SAKIP	Layanan pembinaan pendampingan, fasilitasi, dan penguatan kapasitas seluruh perangkat daerah dalam penguatan akuntabilitas kinerja	Seluruh Perangkat Daerah	Bagian Organisasi
3.	Nilai RB General	Internalisasi dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, integrasi dalam perencanaan dan pelaporan, serta pembinaan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan RB. - Sosialisasi Kebijakan Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah	Bagian Organisasi



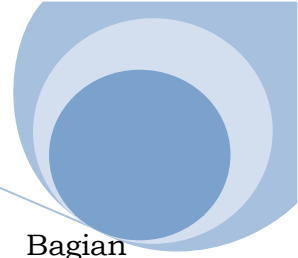


Kabupaten Pesisir  
Selatan

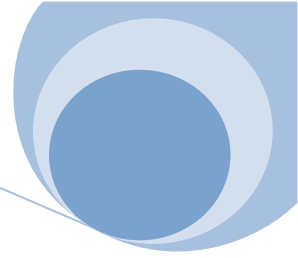
- Pendampingan Implementasi Reformasi Birokrasi General dan tematik Internalisasi Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja

4.	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	- Layanan pembinaan dan sosialisasi indikator evaluasi mandiri penyelenggaraan pelayanan publik	- Layanan pendampingan pemenuhan Standar Pelayanan Publik	Seluruh Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah
5.	Rata-rata indeks kepuasan terhadap Layanan Sekretariat Daerah	Pelayanan terhadap penerima Mesjid/Mushala, Lembaga/Organisasi	Layanan evaluasi mandiri penyelenggaraan pelayanan publik, analisis hasil, serta penetapan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan nilai IPP ke kategori “Baik” atau lebih tinggi.	Penerima Hibah	Bagian Kesra





6. Indeks Kualitas Kebijakan
1. **Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan** Seluruh Perangkat Daerah Bagian Hukum  
Setda berperan sebagai koordinator utama dalam memastikan keselarasan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029. Hal ini dilakukan melalui pembentukan tim kerja.
  2. **Penyusunan Berbasis Data dan Bukti**  
Penyusunan Renstra memanfaatkan data kuantitatif dan kualitatif dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, seperti Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024, serta Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk memastikan kebijakan berbasis bukti. Data ini digunakan untuk menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur, seperti peningkatan akses pelayanan publik dan penurunan ketimpangan wilayah.
  3. **Partisipasi Publik dan Transparansi**



Sesuai Inmen Nomor 5 Tahun 2025, proses penyusunan Renstra melibatkan konsultasi publik melalui Musrenbang, forum diskusi, dan platform digital PPID Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini memastikan aspirasi masyarakat, termasuk kelompok rentan, terakomodasi dalam perencanaan kebijakan.

#### 4. **Peningkatan**

##### **Kapasitas Aparatur**

Setda

menyelenggarakan

pelatihan dan

bimbingan teknis bagi

aparatur dalam

menyusun Renstra

yang responsif

terhadap isu strategis,

seperti pemberdayaan

masyarakat adat,

penguatan ekonomi

lokal, dan adaptasi

perubahan iklim.

Pelatihan ini mencakup

penggunaan teknologi

digital untuk analisis

data dan perencanaan.

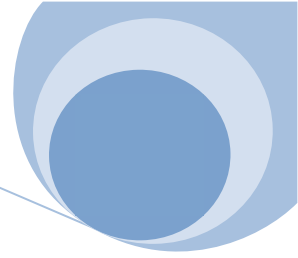
#### 5. **Monitoring dan**

##### **Evaluasi Berbasis**

##### **Indeks Kualitas**

##### **Kebijakan**

Setda mengembangkan

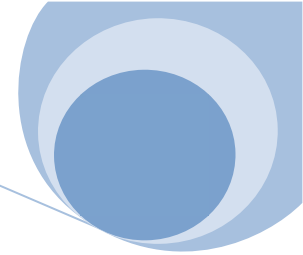


sistem monitoring dan evaluasi (monev) berbasis indeks kualitas kebijakan, yang mencakup parameter seperti ketepatan sasaran, efisiensi pelaksanaan, dan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Indeks ini diukur secara berkala melalui survei kepuasan masyarakat (IKM) dan laporan kinerja tahunan.

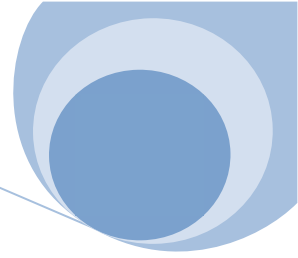
**Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama**

1. Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel Pelayanan peningkatan LPPD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam kualitas Perangkat Daerah Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
2. Persentase pemenuhan penerapan SPM Pelayanan pemenuhan SPM pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penerapan Perangkat Daerah
3. Persentase Rekomendasi terhadap pelaksanaan Kerjasama Daerah
  - Penyusunan Rencana Masyarakat, Perangkat Daerah
  - Pelaksanaan Kerjasama vertical dan semua Instansi maupun lembaga yang ikut terlibat dalam kerja sama
  - Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama
  - Peningkatan Kapasitas





- Sumber Daya Manusia
- Koordinasi dan Sinergi antar Perangkat Daerah
4. Persentase tugas Bupati/Wakil Bupati sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan yang dilaksanakan
- Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Tugas Pembantuan
  - Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi Pemerintahan Daerah
  - Pemberdayaan dan Fasilitasi
  - Pemberian Penghargaan atau Sanksi
  - Penyelesaian Perselisihan Antar-Kecamatan/Nagari
  - Pelantikan Camat/Wali Nagari dan Kepala Perangkat Daerah
  - Pelaporan Tugas Bupati sebagai Wakil Pemerintah Pusat
5. Persentase segmen batas Kecamatan dan Nagari yang difasilitasi
- Memfasilitasi pelaksanaan segmen batas Kecamatan dan Nagari Pemerintah Kabupaten
6. Persentase usulan Nagari/Desa yang difasilitasi penataannya
- Memfasilitasi usulan Nagari/Desa yang sudah diajukan penataannya Pemerintah Kabupaten
7. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
- Pelayanan internal pada ASN dan Non ASN ASN dalam hal asistensi pembuatan IKU, PK, Rencana Aksi, SKP dan dokumen kinerja ASN Bagian Pemerintahan dan Kerjasama ASN



- lainnya
8. Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan organisasi Pelayanannya kepada masyarakat, Kabupaten/Kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya yang menerima layanan Pelaku pengadaan dan masyarakat

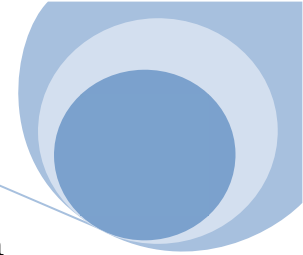
**Bagian Kesejahteraan Rakyat**

1. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat ➤ Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat dan Bagian Perangkat Daerah Kesra yang membutuhkan pelayanan
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Peningkatan Profesionalisme SDM Pelayanan Publik
- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial
- Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan

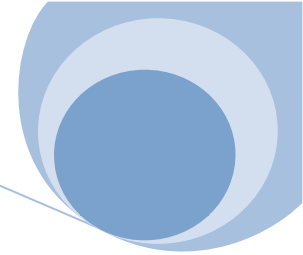
**Bagian Hukum**

1. Indeks Reformasi Hukum - Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Produk Hukum Daerah Pemerintah Daerah dan Pusat
- Identifikasi dan Pemetaan Regulasi Bagian Hukum dan Pusat
- Reregulasi dan Deregulasi Peraturan Daerah Bagian Hukum dan Pusat
- Fasilitasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum Bagian Hukum dan Pusat
- Peningkatan Bagian Hukum dan





	Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan	SDM terkait serta Instansi vertikal yang terkait
	- Sosialisasi dan Diseminasi Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum dan instansi terkait
	- Penyelesaian Permasalahan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi	Bagian Hukum dan instansi terkait
2.	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	
	- Penyusunan dan Penguatan Regulasi Berbasis HAM	Bagian Hukum dan instansi terkait
	- Penyediaan Data Dukung Aksi HAM	
	- Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan HAM	
	- Fasilitasi Pemenuhan Hak Kelompok Rentan	
	- Koordinasi dan Pengawasan Pelaksanaan Aksi HAM di Kabupaten/Kota	
	- Penyelesaian Permasalahan HAM	
	- Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Aksi HAM	
	- Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Perspektif HAM	
3.	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	
	- Penyediaan Bantuan Hukum Litigasi	Bagian Hukum dan instansi terkait
	- Penyediaan Bantuan Hukum Non-Litigasi	
	- Sosialisasi dan Edukasi Hukum	
	- Koordinasi dengan Lembaga Bantuan	

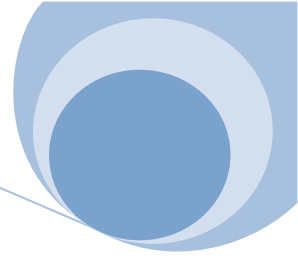


		Hukum dan Instansi Terkait	
		- Penyediaan Pos Bantuan Hukum	
		- Penanganan Pengaduan Hukum Masyarakat	
		- Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Fasilitasi Bantuan Hukum	
		- Pelaporan dan Evaluasi Fasilitasi Bantuan Hukum	
4.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Pelayanan internal pada ASN dalam hal asistensi pembuatan IKU, PK, Rencana Aksi, SKP dan dokumen kinerja ASN lainnya	ASN Bagian Hukum Bagian Hukum
5.	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Pelayanan prima kepada masyarakat yang butuh pelayanan	Bagian Hukum

**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**

1.	Indeks Kelola Barang dan Jasa	Tata • Pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait Pengadaan Barang dan Jasa	Perangkat Daerah Kabupaten Selatan dan Kabupaten Pesisir dan UKPBJ Kabupaten	Bagian PBJ
		• Monitoring berkala terhadap capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik pada Perangkat Daerah		
2.	Nilai Akuntabilitas	Pelayanan internal pada ASN Bagian Pengadaan	ASN Bagian PBJ	Bagian PBJ





Kinerja	Barang dan Jasa dalam hal asistensi pembuatan IKU, PK, Rencana Aksi, SKP dan dokumen kinerja ASN lainnya		
3. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Pelayanan prima kepada pelaku pengadaan dan masyarakat untuk pemanfaatan system pengadaan barang dan jasa	Pelaku pengadaan dan masyarakat	Bagian PBJ

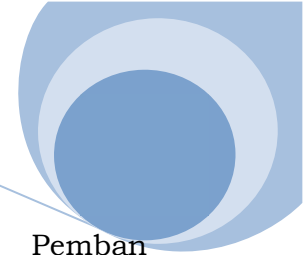
**Bagian Perekonomian dan SDA**

1. Tingkat efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan dan Koordinasi Kebijakan Ekonomi Daerah</li> <li>- Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Ekonomi</li> <li>- Fasilitasi Investasi dan Pengembangan UMKM</li> <li>- Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Ekonomi Daerah</li> </ul>	Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait	Bagian Perekonomian dan SDA
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	Pelayanan internal pada ASN dalam hal asistensi pembuatan IKU, PK, Rencana Aksi, SKP dan dokumen kinerja ASN lainnya	ASN Perekonomian dan SDA	Bagian Perekonomian dan SDA
3. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Pelayanan prima kepada masyarakat dan instansi terkait		Bagian Perekonomian dan SDA

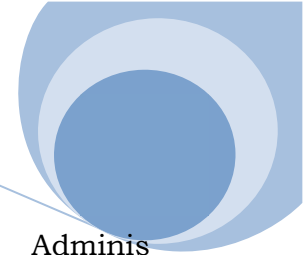
**Bagian Administrasi Pembangunan**

1. Persentase Perangkat Daerah	Memberikan pelayanan kepada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah	Perangkat Daerah Kabupaten Selatan	Bagian Adminis trasi
--------------------------------	---	------------------------------------	----------------------





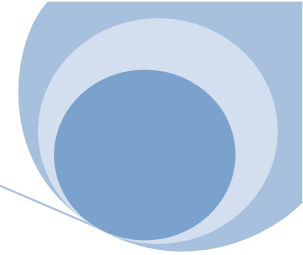
Kabupaten yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal melakukan evaluasi terhadap pencapaian penggunaan anggaran APBD yang menghasilkan capaian realisasi fisik dan keuangan secara berkala setiap bulanan melalui penggunaan aplikasi Sistem Pembangunan Daerah (Simbangda) yang berbasis evidence Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang akan menghasilkan realisasi fisik dan keuangan dari setiap anggaran yang bersumber dari dana APBD		Pembangunan
2. Persentase Perangkat Daerah yang tertib Administrasi Pelaksanaan	Memberikan pelayanan kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana APBD/APBN dengan meminta laporan realisasi fisik dan keuangan terhadap penggunaan anggaran tersebut. Termasuk juga evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan anggaran Bantuan Khusus Keuangan yang dana nya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan	Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan
3. Nilai	Pelayanan internal pada ASN	ASN	Bagian Bagian



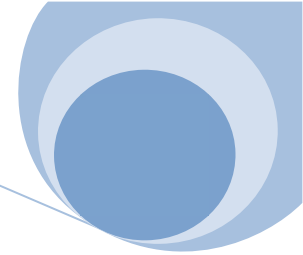
Akuntabilitas Kinerja OPD	ASN dalam hal asistensi pembuatan IKU, PK, Rencana Aksi, SKP dan dokumen kinerja ASN lainnya	Administrasi Pembangunan	Adminis trasi Pemban gunan
4. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Pelayanan terhadap OPD, Instansi teknis terkait dalam pencapaian indikator kinerja Bagian Administrasi Pembangunan	Perangkat Daerah terkait	Bagian Adminis trasi Pemban gunan

**Bagian Organisasi**

1. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal A	Layanan pembinaan pendampingan, fasilitasi, dan penguatan kapasitas seluruh perangkat daerah dalam penguatan akuntabilitas kinerja	Seluruh Perangkat Daerah	
2. Persentase Kab/Kota dengan Nilai SAKIP Minimal BB	Layanan fasilitasi, pendampingan Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Seluruh Perangkat Daerah	
3. Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemda	Pelayanan pembinaan pendampingan, reviu draft laporan untuk menguatkan kualitas pelaporan kinerja	Seluruh Perangkat Daerah	
4. Persentase Perangkat daerah dengan Indeks RB Perangkat Daerah dengan kategori Minimal B	Internalisasi dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, integrasi dalam perencanaan dan pelaporan, serta pembinaan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan RB. - Sosialisasi Kebijakan	Seluruh Perangkat Daerah	



- Reformasi Birokrasi  
Kabupaten Pesisir  
Selatan
- Pendampingan Implementasi Reformasi Birokrasi General dan tematik
  - Internalisasi Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
5. Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran
- Review struktur dan beban kerja OPD
  - Evaluasi tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
  - Reorganisasi atau penggabungan unit kerja yang tidak efisien
  - Penyesuaian tipe perangkat daerah (tipe A, B, atau C) sesuai Permendagri 99/2018
  - Rekomendasi teknis perubahan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja)
- Seluruh Perangkat Daerah
6. Persentase kelembagaan OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran
- Evaluasi Kelembagaan perangkat daerah
  - Pendampingan Terhadap Penataan Kelembagaan
- Seluruh Perangkat Daerah
7. Persentase Perangkat Daerah pelayanan publik yang memiliki Nilai IPP "Baik" hasil evaluasi mandiri
- Layanan pembinaan dan sosialisasi indikator evaluasi mandiri penyelenggaraan pelayanan publik
  - Layanan pendampingan pemenuhan Standar Pelayanan Publik
- Seluruh Perangkat Daerah

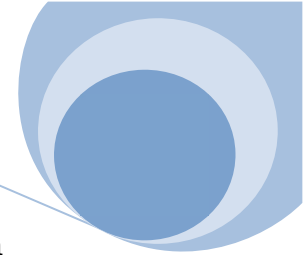


- Layanan evaluasi mandiri penyelenggaraan pelayanan publik, analisis hasil, serta penetapan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan nilai IPP ke kategori “Baik” atau lebih tinggi.
8. Persentase OPD yang memiliki Nilai IPP "Baik"
- Layanan pembinaan dan fasilitas evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tingkat OPD untuk menghasilkan nilai IPP kategori “Baik”
  - Layanan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil IPP
9. Persentase Tatalaksana Perangkat Daerah yang efektif
- Layanan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi dalam Penyusunan dan pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peta Probis (Proses Bisnis)

**Bagian umum**

2. IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH
- Pelayanan terhadap tamu rumah KDH/WKDH dimanapun pimpinan tersebut menerima tamu.
- Seluruh Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH (Masyarakat, Ormas, OPD, Instansi Vertikal, Kecamatan, dll)
2. IKM Pelayanan
- Pelayanan yang diberikan Sekretaris Daerah,





- |  |   |  |
|--|---|--|
| Pimpinan   | kepada Sekretaris Daerah, para Staf Ahli dan para Staf Ahli dan Para Asisten dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja | para Staf Ahli dan Para Asisten            |
| 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja                             | Pelayanan internal pada ASN Biro Umum dalam hal asistensi pembuatan IKU, PK, Rencana Aksi, SKP dan dokumen kinerja ASN lainnya          | ASN Bagian Umum                            |
| 4. Indeks Kepuasan Stakeholder Thd Layanan Adm Kepegawaian | Pelayanan terhadap ASN dan NON ASN lingkup Sekretariat Daerah dalam pengurusan administrasi kepegawaian                                 | ASN dan NON ASN Lingkup Sekretariat Daerah |

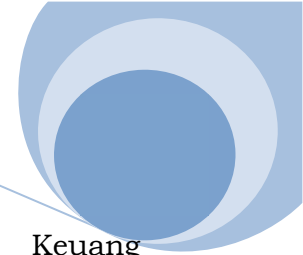
**Bagian Prokopim**

- |   |   |   |                  |
|---|---|---|------------------|
| 1. Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Keprotokolan      | Pelayanan terhadap tamu-tamu pimpinan yang melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan OPD/Kementrian/Lembaga Vertikal yang membutuhkan pelayanan keprotokolan dan fasilitasi acara | Tamu-tamu pimpinan dan OPD/Kemetrian/Lembaga Vertikal | Bagian Prokopi m |
| 2. Tingkat kepuasan pimpinan terhadap layanan komunikasi pimpinan | Pelayanan terhadap fasilitasi dan layanan pimpinan terhadap layanan komunikasi pimpinan   | Pimpinan Pemerintah Daerah                            |                  |

**Bagian Perencanaan dan Keuangan**

- |                                |  |                             |                        |
|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|
| 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja | Pelayanan internal pada ASN dalam hal asistensi pembuatan IKU, PK, Rencana Aksi, SKP dan | Bagian-Bagian Lingkup Setda | Bagian Perencanaan dan |
|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|





		dokumen kinerja ASN lainnya	Keuang an
2	IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	Pelayanan yang diberikan kepada Bagian-bagian Lingkup Setda dalam hal penatausahaan keuangan	Pengelola keuangan pada Bagian-bagian lingkup Setda

**Sumber: Data Olahan Sekretariat Daerah**

## **2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah**

### **1.2.1 Permasalahan**


Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berperan sebagai koordinator utama dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat untuk mewujudkan visi "Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan". Sesuai misi pertama RPJMD 2025-2029, yaitu "Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas" melalui Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efisien, akuntabel dan berdaya saing melalui urusan Sekretariat Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmen) Nomor 2 Tahun 2025, Sekretariat Daerah menyusun Renstra sebagai satu kesatuan perangkat daerah untuk memastikan sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, Sekretariat Daerah menghadapi sejumlah permasalahan yang memengaruhi efektivitas kinerja. Melalui pendekatan teknik matrik, permasalahan dianalisis berdasarkan faktor penyebab dan dampaknya untuk menyimpulkan isu strategis yang menjadi fokus Renstra 2025-2029. Berikut dijelaskan beberapa Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah untuk tahun 2025-2029.

Permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

#### **1. Belum Optimalnya Implementasi SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan**

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Implementasi SAKIP





dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja sebuah instansi pemerintah dan menjadi bagian penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Walaupun belum optimal, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah mengimplementasikan SAKIP dengan baik. Hal ini terlihat dari:

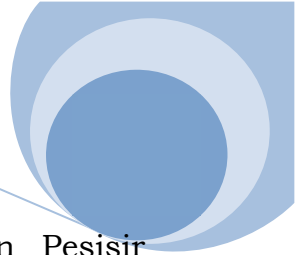
- Perolehan nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2024 masih di Predikat 77,12 (BB). Belum banyaknya perangkat daerah yang nilai akuntabilitas kinerjanya berpredikat A. Pada tahun 2024, Perangkat Daerah yang berpredikat A.

Adapun yang menjadi penyebab belum optimalnya implementasi SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:

1. Belum semua Pimpinan OPD memahami peran mereka dalam implementasi SAKIP di OPD nya dan pemahaman implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah masih terbatas pada ASN yang terlibat langsung dalam implementasi SAKIP di OPD nya masing-masing.
2. Masih belum semua evaluator memiliki pemahaman yang sama tentang SAKIP.
3. Belum semua perangkat daerah memahami dan menindaklanjuti rekomendasi evaluasi dari Inspektorat Daerah secara tepat.
4. Belum semua perangkat daerah melaksanakan evaluasi internal terhadap pencapaian kinerja secara berkala.
5. Belum optimalnya penggunaan aplikasi sakip dalam menunjang implementasi SAKIP pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

## **2. Belum optimal penerapan standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**

Standar Pelayanan Publik merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik wajib dimiliki oleh setiap penyelenggara layanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



Meskipun sebagian besar perangkat daerah di Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun dokumen Standar Pelayanan Publik, namun implementasinya **belum berjalan secara optimal**. Hal ini berdampak pada **kualitas layanan yang belum konsisten** dan **rendahnya kepuasan masyarakat**.

**3. Belum Optimalnya Penataan Kelembagaan dalam hal Evaluasi Kelembagaan dan Penilaian kematangan organisasi perangkat daerah**

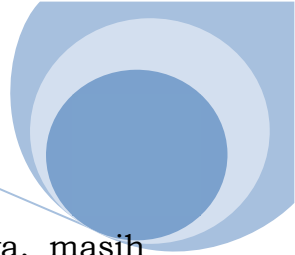
Penataan kelembagaan pemerintah merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan organisasi yang **efektif, efisien, adaptif, dan akuntabel**. Dalam konteks ini, evaluasi kelembagaan dan penilaian kematangan organisasi menjadi alat strategis untuk memastikan bahwa struktur dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, pada tingkat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, **implementasi evaluasi kelembagaan dan penilaian kematangan organisasi belum berjalan optimal**. Hal ini berdampak pada struktur organisasi yang belum sepenuhnya rasional, tumpang tindih tugas, serta lemahnya pengambilan kebijakan berbasis data organisasi.

**4. Kurangnya Integrasi Koordinasi Lintas Bagian**

Meskipun Setda kini menyusun Renstra sebagai satu kesatuan perangkat daerah, koordinasi antar bagian, seperti Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama, Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Bagian Organisasi, dan Bagian Umum, masih menghadapi tantangan dalam integrasi kebijakan dan program. Hal ini menyebabkan potensi tumpang tindih tugas dan kurangnya sinergi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang efektif, seperti dalam pengelolaan aset atau implementasi program lintas sektoral.

**5. Kapasitas Aparatur yang Belum Memadai untuk Transformasi Digital.**

Misi Pertama menekankan mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas melalui pemanfaatan teknologi. Namun, kompetensi aparatur Setda dalam mengelola sistem digital, seperti aplikasi E



Kinerja untuk platform pelayanan berbasis teknologi lainnya, masih terbatas. Kurangnya pelatihan intensif dan keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah menghambat pencapaian tata kelola yang responsif.

6. **Belum optimalnya Kontribusi Aset Daerah terhadap PAD**  
Pengelolaan aset daerah, seperti Painan Convention Center, belum optimal dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kurangnya inovasi dalam pengelolaan aset dan terbatasnya kerjasama dengan pihak swasta menghambat kontribusi keuangan untuk mendukung program pelayanan publik yang efektif.
7. **Keterbatasan Akses dan Literasi Digital Masyarakat**  
Implementasi pelayanan publik berbasis teknologi, yang menjadi bagian dari misi Pertama, terkendala oleh rendahnya literasi digital masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, serta ketimpangan infrastruktur digital antar-wilayah di Pesisir Selatan. Hal ini memengaruhi aksesibilitas layanan publik yang responsif dan inklusif.
8. **Lemahnya Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Terintegrasi**  
Pengelolaan program dan kerjasama daerah belum didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Hal ini menyulitkan Setda untuk mengukur capaian kinerja secara real-time, termasuk dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel sesuai misi kedelapan.

### 1.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis Sekretariat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah.  
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari pelaksanaan *good governance* (tata pemerintahan yang baik). Akuntabilitas kinerja penting untuk dilaksanakan agar kinerja yang



dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah efektif, efisien dan berdampak bagi masyarakat.

Penerapan Akuntabilitas kinerja dapat dilihat dari bagaimana Pemerintah Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan implementasi SAKIP secara terstruktur dan berkesinambungan dapat mengawal agar anggaran berdampak terhadap masyarakat artinya anggaran tersebut digunakan untuk aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga penggunaan anggaran efisiensi dan efektivitas.

## 2. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik

Tata Kelola Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi berfokus pada peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh masing-masing Bagian kepada pengguna layanan. Hal Ini mencakup aspek transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta kemudahan akses terhadap layanan yang diberikan kepada pengguna layanan.

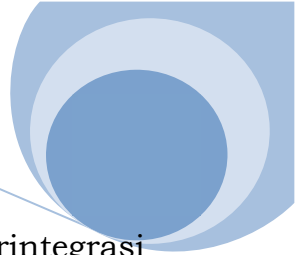
Isu ini mengindikasikan perlunya strategi perbaikan kualitas layanan dalam memastikan bahwa struktur dan proses pelayanan publik berjalan dengan efisien, efektif, dan akuntabel. Karena Bagian Organisasi sebagai unit di dalam pemerintahan memiliki tanggung jawab dalam merancang, mengatur, dan mengawasi struktur organisasi serta kebijakan internal untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

## 3. Optimalisasi penataan organisasi perangkat daerah

Optimalisasi Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah langkah strategis yang dilakukan untuk memperbaiki struktur dan kinerja organisasi di tingkat pemerintah daerah agar lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Isu ini berkaitan dengan evaluasi struktur organisasi perangkat daerah (OPD), jumlah dan fungsi unit kerja, kesesuaian tugas dan beban kerja. Fokusnya adalah agar organisasi pemerintahan tidak tumpang tindih dan bisa memberikan pelayanan serta menjalankan fungsinya secara maksimal.

Penataan OPD yang baik akan mempercepat proses administrasi dan meminimalisir birokrasi yang tidak efisien, sekaligus memperkuat daya saing dan kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan.

- 
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Terintegrasi  
Untuk mendukung misi pertama " Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas," Setda perlu memperkuat integrasi koordinasi lintas bagian melalui penyusunan Renstra sebagai satu kesatuan perangkat daerah. Pengembangan sistem informasi terpadu dan mekanisme koordinasi yang jelas menjadi isu strategis untuk memastikan kebijakan dan program selaras dengan RPJMD 2025-2029.
  5. Peningkatan Kapasitas Aparatur untuk Pelayanan Publik Berbasis Teknologi  
Transformasi digital dalam pelayanan publik menuntut aparatur Setda memiliki kompetensi dalam pengelolaan teknologi dan analisis data. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan intensif dan kemitraan dengan institusi pendidikan menjadi isu strategis untuk mendukung pelayanan yang efektif dan responsif.
  6. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah untuk Mendukung PAD  
Dalam rangka mendukung keberlanjutan pembiayaan program pelayanan publik, pengelolaan aset daerah perlu dioptimalkan melalui kerjasama dengan pihak swasta dan penerapan model bisnis inovatif. Ini menjadi isu strategis untuk meningkatkan PAD guna mendukung tata kelola yang akuntabel.
  7. Peningkatan Akses dan Literasi Digital Masyarakat  
Untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, Setda perlu mengatasi kesenjangan infrastruktur digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Pengembangan platform pelayanan yang user-friendly dan kampanye literasi digital menjadi isu strategis untuk mendukung misi Pertama.
  8. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis Teknologi  
Penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dan berbasis teknologi menjadi isu strategis untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program. Sistem ini akan mendukung pengukuran capaian kinerja Setda sesuai indikator RPJMD, termasuk dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.
  9. Integrasi sistem pelaporan pembangunan lintas sektor dan wilayah, keamanan siber, dan pemanfaatan big data serta AI dalam analisis capaian pembangunan.

10. Penguatan peran bagian dalam koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan proyek prioritas provinsi serta penyelesaian hambatan implementasi.
11. Regulasi yang kaku dan belum mampu mengakomodasi dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat serta inovasi pemerintahan, hal ini dikarenakan belum adanya sistem regulasi dan kebijakan yang mendukung digitalisasi sesuai perkembangan zaman, serta terkait re-regulasi dan deregulasi/penataan produk hukum daerah yang belum sepenuhnya terfasilitasi dengan baik.
12. Perlu penguatan mekanisme perencanaan yang berbasis kinerja dan berbasis hasil (result-based planning), serta harmonisasi antara pemerintah provinsi - kab/kota.
13. Pengembangan sistem monev berbasis teknologi, pelibatan pihak ketiga atau masyarakat dalam evaluasi (open monev), dan penyusunan dashboard kinerja pembangunan
14. Integrasi indikator keberlanjutan dalam perencanaan dan pelaporan pembangunan, serta mendorong proyek hijau dan rendah karbon
15. Pengembangan kompetensi SDM terkait secara berkelanjutan agar pemahaman terhadap aturan dapat ter-*update* dengan lebih baik lagi.
16. Masih kurangnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat, dikarenakan ketidakjelasan pemahaman hak oleh pemerintah dan masyarakat.
17. Pengembangan Data dan Sistem Informasi HAM yang Terintegrasi, dikarenakan ketimpangan pelaksanaan aksi HAM antar daerah, dimana beberapa aspek terkait yang perlu diperhatikan seperti : kebijakan yang lebih ketat, peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi anggaran, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HAM.

**TABEL 2.3**  
**TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

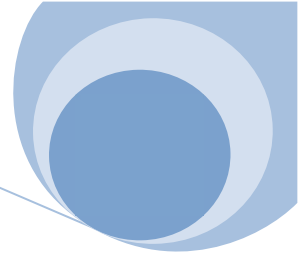
Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	Belum				Kurangny	Pengpublikasi

	optimalnya pelaksanaan pelayanan publik lingkup Sekretariat Daerah				a akses dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasis online	an setiap pelaksanaan kegiatan khususnya pelayanan public sesuai dengan standar lingkup Sekretariat Daerah
	Kapasitas aparatur terbatas dalam transformasi digital				SDM yang terbatas	Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan intensif teknologi digital dan kemitraan dengan institusi pendidikan untuk mendukung pelayanan publik yang efektif.
	Kurang optimalnya pengelolaan aset daerah				Pengelolaan Aset Daerah yang masih belum baik	Optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui kerjasama swasta dan model bisnis inovatif untuk mendukung pembiayaan pelayanan publik.
	Kesenjangan akses dan literasi digital masyarakat					Peningkatan akses dan literasi digital masyarakat melalui pengembangan infrastruktur digital dan kampanye edukasi untuk pelayanan publik yang inklusif.
	Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi					Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih

						dan akuntabel.
	Permasalahan pada Aspek Pelayanan Publik				Pelayanan Publik	Pelayanan Publik yang mencakup Kualitas Regulasi, Infrastruktur dan Efektivitas Pelayanan
	Permasalahan pada Aspek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE yang mencakup pengembangan layanan, peningkatan kualitas layanan, penyediaan data dan informasi dan peningkatan kapasitas SDM
	Permasalahan pada Aspek Sarana dan Prasarana					Sarana dan prasarana yang mencakup kebutuhan meja dan kursi pelayanan, kebutuhan internet gratis, kebutuhan kendaraan
	Regulasi dan Kebijakan yang Belum Sepenuhnya Mendukung Digitalisasi				Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan	Regulasi yang kaku dan belum mampu mengakomodasi dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat serta inovasi pemerintahan
	Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi					Pengembangan kompetensi SDM
	Ketidajelasan pemahaman hak oleh pemerintah dan masyarakat					Masih kurangnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat
	Ketimpangan Pelaksanaan					Pengembangan Data dan

	Aksi HAM antar Daerah					Sistem Informasi HAM yang Terintegrasi
	Permasalahan pada Aspek Pelayanan Publik				Pelayanan Publik	Pelayanan Publik yang mencakup Kualitas Regulasi, Infrastruktur dan Efektivitas Pelayanan
	Permasalahan pada Aspek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE yang mencakup pengembangan layanan, peningkatan kualitas layanan, penyediaan data dan informasi dan peningkatan kapasitas SDM
	Permasalahan pada Aspek Sarana dan Prasarana					Sarana dan prasarana yang mencakup kebutuhan meja dan kursi pelayanan, kebutuhan internet gratis, kebutuhan kendaraan
	Belum Optimalnya Implementasi SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan					Optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah
	Belum optimal penerapan standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan					Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik
	Belum Optimalnya Penataan Kelembagaan dalam hal Evaluasi Kelembagaan dan Penilaian kematangan organisasi					Optimalisasi penataan organisasi perangkat daerah

	perangkat daerah					
	Belum optimalnya pemahaman SDM dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa					Pemenuhan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ
	Belum optimalnya tatakelola terkait pengadaan barang dan jasa					Pemanfaatan Sistem Pengadaan
	Belum optimalnya modernisasi pengadaan barang dan jasa melalui pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik					Tingkat Kematangan UKPBJ
	Belum Optimalnya Implementasi SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				Penguatan Akuntabilitas	Optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah
	Belum optimal penerapan standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan				Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik
	Belum Optimalnya Penataan Kelembagaan dalam hal Evaluasi Kelembagaan dan Penilaian kematangan Organisasi Perangkat Daerah				Penataan Kelembagaan	Optimalisasi penataan organisasi Perangkat Daerah



### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Visi Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah :

**“PESISIR SELATAN MAJU,  
TUMBUH DAN BERKELANJUTAN”**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

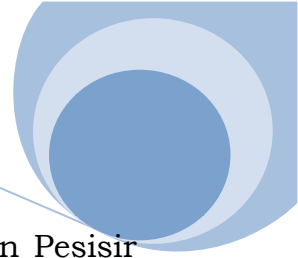
Maju	:	Mengacu pada pembangunan yang progresif di berbagai sektor, termasuk Infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan teknologi.
------	---	---

Tumbuh	:	Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, <b>"tumbuh"</b> bukan hanya sekedar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta mampu menjawab tantangan zaman demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Berkelanjutan	:	Menegaskan bahwa prinsip pembangunan yang tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan menyeimbangkan tiga pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, agar daerah dapat berkembang dengan tetap menjaga keseimbangan dan keberlanjutan sumber daya yang dimiliki.

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun ke depan, maka untuk **MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN** dilaksanakan melalui 5 ( Lima ) Misi yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berakhlak
3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Masyarakat yang Sejahtera
4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif
5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2021-2026 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMD Nasional Tahun 2025-2029 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pesisir



Selatan Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima.
2. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan.
3. Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis.
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
5. peningkatan derajat kesehatan masyarakat Pesisir Selatan.
6. Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan ABS-SBK.
7. Peningkatan ekonomi pangan berbasis komoditi lokal yang berdaya saing.
8. Peningkatan daya tarik, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata.
9. Penurunan Tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Rumusan Misi Sekretariat Daerah adalah :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efisien, akuntabel dan berdaya saing melalui urusan Sekretariat Daerah.

Indikator tujuan : Nilai EPPD


Sasaran :

- Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah

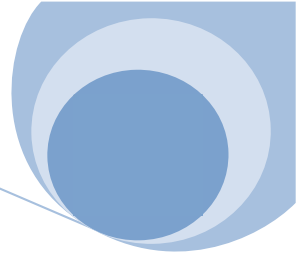
Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja, dan Persentase Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang mencapai Target

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah

Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Sekretariat Daerah dan Nilai Kematangan Inovasi Setda

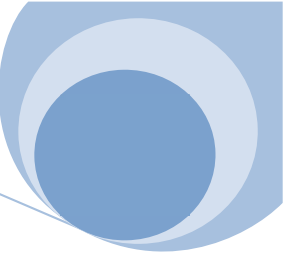


Berdasarkan Visi Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dan untuk memenuhi harapan dari misi di atas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.



**TABEL 3.1  
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efisien, akuntabel dan berdaya saing melalui urusan Sekretariat Daerah		Nilai EPPD	Nilai	2,625	2,700	2,800	2,900	3,000	3,100
			Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai	11,50	11,80	12,00	12,20	12,40	12,60
				Persentase Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang mencapai Target	Persentase	98%	98%	98%	98%	98%	98%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	80 (A)	81 (A)	82 (A)	83 (A)	84 (A)	85 (A)
				Nilai Kematangan Inovasi Setda	Nilai	100	100	100	100	100	100



## **3.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

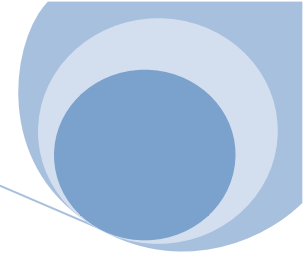
### **3.2.1 Strategi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.



**Tabel 3.2**

**Penahapan Renstra Sekretariat Daerah  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030**

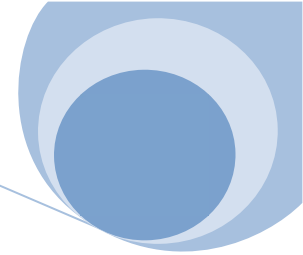
<b>Tahap I (2026)</b>	<b>Tahap II (2027)</b>	<b>Tahap III (2028)</b>	<b>Tahap IV (2029)</b>	<b>Tahap V (2030)</b>
Optimalisasi koordinasi dengan OPD terkait, pelatihan petugas pelayanan, dan digitalisasi pelaporan SPM.	Peningkatan anggaran untuk SPM, monitoring real-time, dan integrasi sistem pelaporan.	Integrasi teknologi AI untuk monitoring SPM dan pelatihan lanjutan.	Penguatan sinergi antar-OPD dan optimalisasi teknologi pelaporan.	Penerapan smart governance untuk SPM dan monitoring berbasis IoT.
Penyusunan laporan kinerja berbasis outcome, pelatihan manajemen kinerja, dan evaluasi internal berkala.	Implementasi sistem manajemen kinerja terintegrasi dan audit kinerja internal.	Optimalisasi cascading kinerja dan peningkatan akuntabilitas keuangan.	Integrasi sistem informasi kinerja dan pelaporan berbasis digital.	Penerapan manajemen kinerja berbasis teknologi dan evaluasi outcome.
Implementasi 8 area perubahan RB, peningkatan kapasitas SDM, dan penyederhanaan proses birokrasi.	Penguatan Zona Integritas, digitalisasi layanan, dan evaluasi RB berkala.	Penerapan manajemen perubahan dan penguatan budaya kerja berbasis kinerja.	Penguatan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) dan digitalisasi penuh.	Pencapaian WBBM dan penguatan budaya birokrasi melayani.
Penyediaan kanal pengaduan, pelatihan soft skills petugas, dan evaluasi berkala kepuasan masyarakat.	Peningkatan responsivitas terhadap pengaduan dan promosi transparansi layanan.	Penguatan kanal digital untuk pengaduan dan peningkatan kualitas SDM.	Peningkatan kualitas layanan berbasis umpan balik masyarakat.	Optimalisasi layanan berbasis umpan balik real-time.
Penyusunan kebijakan berbasis data, konsultasi publik, dan evaluasi dampak kebijakan.	Penguatan analisis kebijakan berbasis big data dan keterlibatan stakeholder.	Penguatan kebijakan berbasis riset dan evaluasi outcome kebijakan.	Implementasi kebijakan berbasis predictive analytics.	Kebijakan berbasis AI dan evaluasi dampak jangka panjang.

**Sumber: Data Olahan Sekretariat Daerah**

**3.2.2 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029**

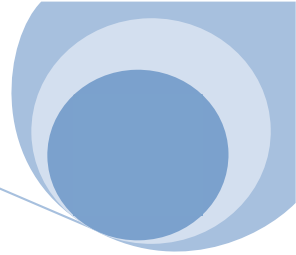
Arah kebijakan merupakan pedoman atau panduan yang mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut arah kebijakan Renstra Sekretariat Daerah yang diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD





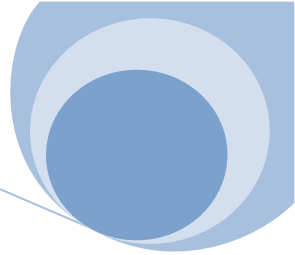
**Tabel 3.3**  
**Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah**  
**Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029**

<b>No.</b>	<b>Operasional NSPK</b>	<b>Arah Kebijakan RPJMD</b>	<b>Arah Kebijakan Renstra</b>	<b>Ket.</b>
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.</li><li>2. Penguatan Dasar Kelembagaan dan Regulasi</li><li>3. Peningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)</li><li>4. Pengembangan System Manajemen Kinerja yang jelas dan terstruktur</li><li>5. Transformasi Kelembagaan Berbasis Kinerja</li><li>6. Mendorong inovasi pelayanan public dan insentif untuk unit kerja inovatif.</li><li>7. Menerapkan budaya kerja yang inovatif</li><li>8. Konsolidasi Inovasi dan penguatan kelembagaan Adaptif</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintahan</li><li>2. Perluasan penerapan e_government</li><li>3. Interoperabilitas data antar instansi</li><li>4. Penerapan system manajemen talenta untuk ASN</li><li>5. Penguatan kolaborasi dan kemitraan strategis</li><li>6. Mengarusutamakan isu Gedsis dalam dokumen perencanaan pembangunan</li><li>7. Peningkatan akses komunikasi bagi penyandang disabilitas dalam layanan pemerintahan (melalui penyediaan JBI)</li><li>8. Mewujudkan pelayanan public yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas</li><li>9. Penguatan kompetensi dan profesionalisme ASN</li><li>10. Membangun manajemen talenta (talent pool) untuk jabatan strategis dan fungsional</li><li>11. Peningkatan literasi digital ASN</li></ol>	



**Tabel 3.4**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029**

<b>VISI : PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN</b>			
<b>MISI I : Mewujudkan Pesisir Selatan yang Profesional dan Berintegritas</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang efisien, akuntabel dan berdaya saing melalui urusan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kualitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sampai ke pemerintahan terendah dengan meningkatkan kompetensi penyelenggara pemerintahan	Menyediakan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, dan penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Penerapan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik Pemerintah Daerah



**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4. 1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Peran strategis Kabupaten Pesisir Selatan menuntut adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor pembangunan baik lokal, regional maupun nasional. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: *reengineering, revitalisasi, restrukturisasi* birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah regulasi dan deregulasi terutama terhadap aturan dan prosedur yang menghambat investasi. Jumlah kebijakan yang dikembangkan meliputi kebijakan publik yang mempunyai dampak bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dan kebijakan pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut di atas, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan

dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada periode 2025-2029.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

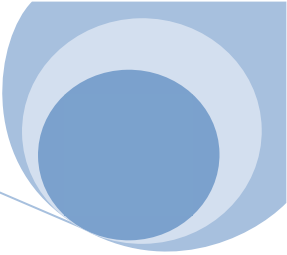
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah periode tahun 2025–2029 terbagi pada 10 (Sepuluh) Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut :

4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
4	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	01	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD
4	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

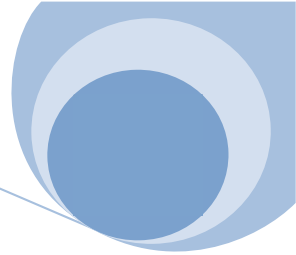


4	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian
4	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan
4	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel
4	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel
4	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4	01	01	2,11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	01	01	2,11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	01	01	2,11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	01	01	2,11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	01	01	2,11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	01	01	2,12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

4	01	01	2,12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
4	01	01	2,12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
4	01	01	2,12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
4	01	01	2,13		Penataan Organisasi
4	01	01	2,13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
4	01	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
4	01	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4	01	01	2,13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
4	01	01	2,13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
4	01	01	2,14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4	01	01	2,14	01	Fasilitasi Keprotokolan
4	01	01	2,14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
4	01	01	2,14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	02	2,01		Administrasi Tata Pemerintahan
4	01	02	2,01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan
4	01	02	2,01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
4	01	02	2,01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
4	01	02	2,02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
4	01	02	2,02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
4	01	02	2,02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
4	01	02	2,02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
4	01	02	2,03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
4	01	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
4	01	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum
4	01	02	2,03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
4	01	02	2,04		Fasilitasi Kerjasama Daerah
4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4	01	03	2,01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
4	01	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
4	01	03	2,01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
4	01	03	2,01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
4	01	03	2,01	06	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
4	1	3	2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
4	01		2,02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
4	01	03	2,02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
4	01	03	2,02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

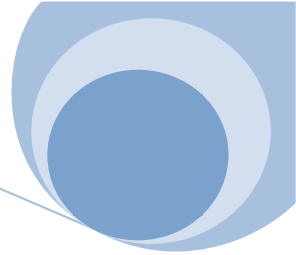


					Pembangunan
4	01	03	2,03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	2,03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	2,03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
4	01	03	2,03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	2,04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
4	01	03	2,04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
4	01	03	2,04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
4	01	03	2,04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

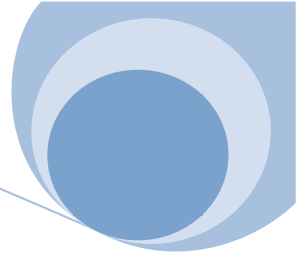


**Tabel 4.1**  
**Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Sekretariat Daerah**  
**Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 - 2029**

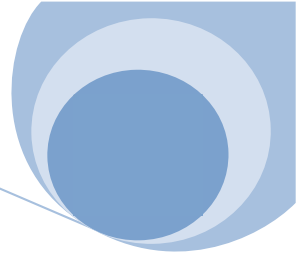
<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang efisien, akuntabel dan berdaya saing melalui urusan Sekretariat Daerah				Nilai EPPD		
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah			Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja		
					Persentase Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang mencapai target		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah			Nilai AKIP Sekretariat Daerah		
					Nilai Kematangan Inovasi Setda		



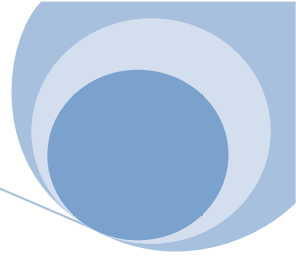
						<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan SEKRETARIAT DAERAH</b>	
			Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Nilai Komponen Pelaporan Kinerja terhadap evaluasi AKIP				
					Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sekretariat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Ketepatan waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sekretariat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



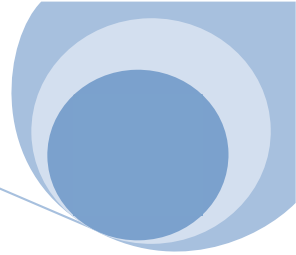
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	
					Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	Administrasi Kepegawaian	



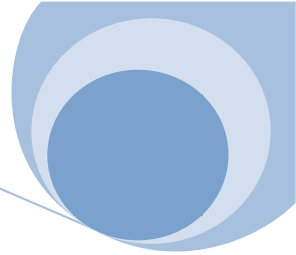
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	



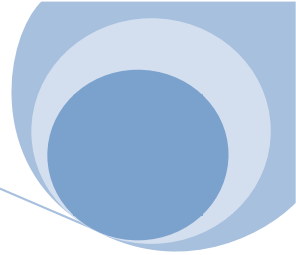
					Persentase Barang Milik Daerah yang diusulkan pada RKBMD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Persentase Layanan Surat menyurat sesuai SOP	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	



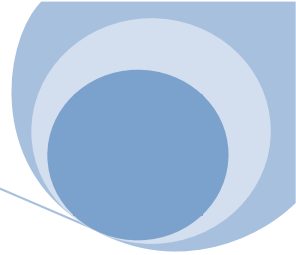
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Persentase Layanan Sarana dan Prasarana sesuai SOP	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



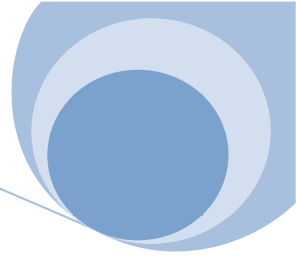
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	



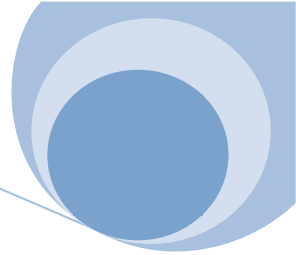
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Persentase Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah yang disediakan	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
					Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Penataan Organisasi	
					Persentase Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang memiliki IKM Baik		
					Nilai RB General		
					Nilai Rata-rata SAKIP Perangkat Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja		



					Indeks Kepuasan Masyarakat		
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Persentase Kegiatan Dokumentasi Pimpinan yang dilaksanakan		
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	

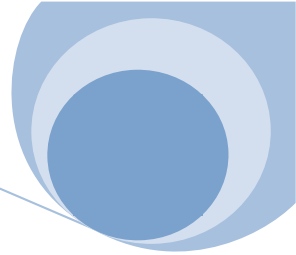


					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
			Efektifitas Kerjasama Daerah			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan				
			Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Kesejahteraan Rakyat				
					Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	

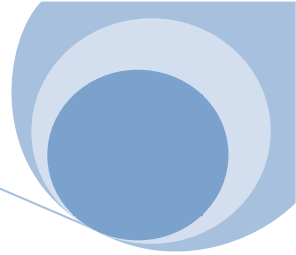


					Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	

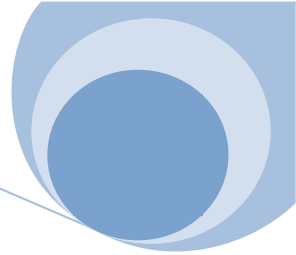




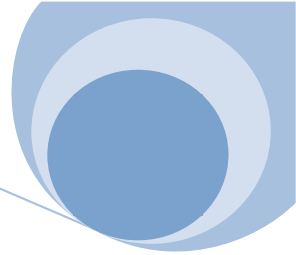
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	
				Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Pemerintah Daerah	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
				Persentase Nagari Binaan Sadar Hukum		
				Persentase Produk Hukum Daerah yang dihasilkan		
				Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	
				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	



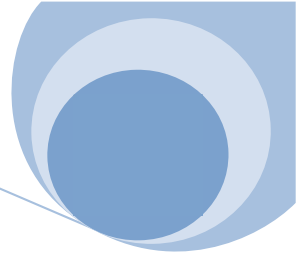
					Efektifitas Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerjasama Daerah	
					Persentase Kerjasama wajib yang dilaksanakan		
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
			Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Tingkat Kematangan UKPBJ				
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa				
					Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Total Kredit/PDRB (%)		
					Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)		
					Nilai Transaksi Saham Perkapita Per Provinsi (Rupiah)		



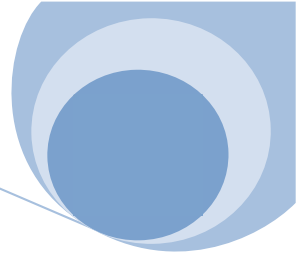
					Return on Aset (ROA) BUMD (%)		
					Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	
					Efektifitas kebijakan Administrasi Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	



					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
					Tingkat Kematangan UKPBJ	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
					Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	

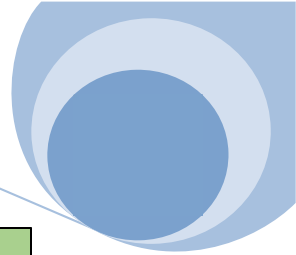


				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	

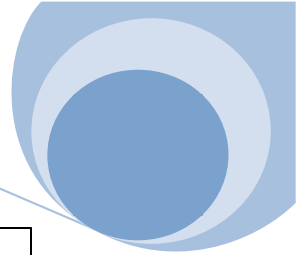


**Tabel 4.2**  
**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Sekretariat Daerah**  
**Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 - 2029**

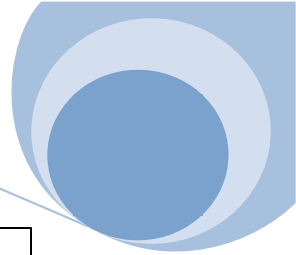
BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KET
		Tahun 2 (2026)		Tahun 3 (2027)		Tahun 4 (2028)		Tahun 5 (2029)		Tahun 6 (2030)		
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21
	Nilai EPPD	2,700		2,800		2,900		3,000		3,100		
	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja	11,80		12,00		12,20		12,40		12,60		
	Persentase Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang mencapai target	98%		98%		98%		98%		98%		
	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	80,00(A)		81,00(A)		82,00(A)		83,00(A)		84,00(A)		
	Nilai Kematangan Inovasi Setda	100		100		100		100		100		
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan												
SEKRETARIAT DAERAH												



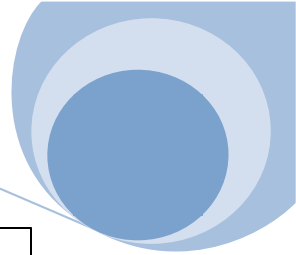
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	28.424.627.976	100%	28.869.718.408	100%	29.278.892.958	100%	29.573.892.958	100%	33.252.943.008	
	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja terhadap evaluasi AKIP	11,80		12,00		12,20		12,40		12,60		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sekretariat Daerah	100%	125.000.000	100%	130.000.000	100%	135.000.000	100%	140.000.000	100%	145.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	125.000.000	4 Dokumen	130.000.000	4 Dokumen	135.000.000	4 Dokumen	140.000.000	4 Dokumen	145.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sekretariat Daerah	100%	14.815.000.000	100%	14.870.000.000	100%	14.885.000.000	100%	14.900.000.000	100%	14.915.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang	14.400.000.000	97 Orang	14.450.000.000	97 Orang	14.460.000.000	97 Orang	14.470.000.000	97 Orang	14.480.000.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan /	12 Laporan	380.000.000	12 Laporan	385.000.000	12 Laporan	390.000.000	12 Laporan	395.000.000	12 Laporan	400.000.000	



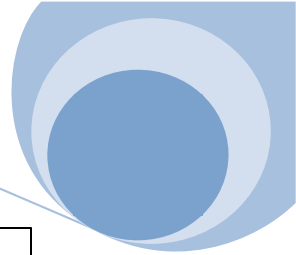
	Semesteran SKPD											
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	100%	55.000.000	100%	115.000.000	100%	125.000.000	100%	135.000.000	100%	145.000.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	55.000.000	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	65.000.000	4 Laporan	70.000.000	4 Laporan	75.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4 Laporan	55.000.000	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	65.000.000	4 Laporan	70.000.000	
Administrasi Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	20%	100.000.000	30%	100.000.000	40%	100.000.000	50%	100.000.000	60%	100.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	100%	1.621.934.830	100%	1.731.934.830	100%	1.821.934.830	100%	1.951.934.830	100%	2.071.934.830	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	150.000.000	4 Paket	180.000.000	4 Paket	200.000.000	4 Paket	230.000.000	4 Paket	250.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	150.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	250.000.000	2 Paket	300.000.000	2 Paket	350.000.000	



Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	150.000.000	3 Laporan	180.000.000	3 Laporan	200.000.000	3 Laporan	250.000.000	3 Laporan	300.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.071.934.830	12 Laporan	1.071.934.830	12 Laporan	1.071.934.830	12 Laporan	1.071.934.830	12 Laporan	1.071.934.830	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2000 Dokumen	50.000.000	2000 Dokumen	50.000.000	2000 Dokumen	50.000.000	2000 Dokumen	50.000.000	2000 Dokumen	50.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diusulkan pada RKBMD	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	3.745.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan									2 Unit	1.600.000.000	
Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan									2 Unit	1.150.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	400.000.000	2 Unit	400.000.000	2 Unit	400.000.000	2 unit	400.000.000	7 Unit	945.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	50.000.000	4 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	6 Unit	50.000.000	7 Unit	50.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Surat menyurat sesuai SOP	100%	3.095.000.000	100%	2.905.000.000	100%	2.910.000.000	100%	2.920.000.000	100%	2.920.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	140.000.000	12 laporan	135.000.000	12 laporan	140.000.000	12 laporan	150.000.000	12 laporan	150.000.000	

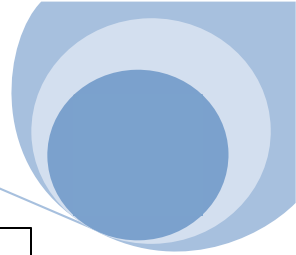


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 paket	1.295.000.000	4 paket	1.100.000.000	4 paket	1.100.000.000	4 paket	1.100.000.000	4 paket	1.100.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	210.000.000	1 paket	220.000.000	1 paket	220.000.000	1 paket	220.000.000	1 paket	220.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.450.000.000	12 laporan	1.450.000.000	12 laporan	1.450.000.000	12 laporan	1.450.000.000	12 laporan	1.450.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Sarana dan Prasarana sesuai SOP	100%	2.102.735.018	100%	2.222.825.450	100%	2.312.000.000	100%	2.312.000.000	100%	2.421.050.050	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	447.732.919	9 Unit	487.375.450	9 Unit	500.000.000	9 Unit	500.000.000	9 Unit	550.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	437.100.000	15 Unit	450.000.000	15 Unit	471.000.000	15 Unit	471.000.000	15 Unit	490.050.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7 Unit	802.175.500	7 Unit	845.175.000	7 Unit	865.000.000	7 Unit	865.000.000	7 Unit	896.000.050	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	184.590.600	15 Unit	200.000.000	15 Unit	221.000.000	15 Unit	221.000.000	15 Unit	225.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	55.000.000	2 Unit	60.000.000	2 Unit	65.000.000	2 Unit	65.000.000	2 Unit	70.000.000	

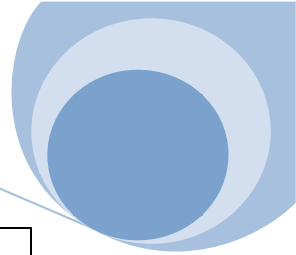


	si											
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	176.135.999	2 Unit	180.275.000	2 Unit	190.000.000	2 Unit	190.000.000	2 Unit	190.000.000	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	100%	1.890.000.000	100%	1.920.000.000	100%	1.950.000.000	100%	1.970.000.000	100%	1.990.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	900.000.000	2 Orang/Bulan	910.000.000	2 Orang/Bulan	920.000.000	2 Orang/Bulan	930.000.000	2 Orang/Bulan	940.000.000	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	210.000.000	2 Paket	220.000.000	2 Paket	230.000.000	2 Paket	240.000.000	2 Paket	250.000.000	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	80.000.000	2 Orang	90.000.000	2 Orang	100.000.000	2 Orang	100.000.000	2 Orang	100.000.000	
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	±400 Org	700.000.000	±400 Org	700.000.000	±400 Org	700.000.000	±400 Org	700.000.000	±400 Org	700.000.000	
Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang disediakan	100%	2.400.000.000	100%	2.710.000.000	100%	2.880.000.000	100%	2.990.000.000	100%	3.100.000.000	

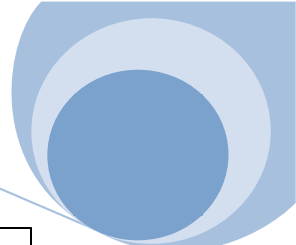




Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.350.000.000	1 Paket	1.450.000.000	1 Paket	1.500.000.000	1 Paket	1.550.000.000	1 Paket	1.600.000.000	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	750.000.000	1 Paket	850.000.000	1 Paket	950.000.000	1 Paket	1.000.000.000	1 Paket	1.050.000.000	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	300.000.000	1 Paket	410.000.000	1 Paket	430.000.000	1 Paket	440.000.000	1 Paket	450.000.000	
Penataan Organisasi	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	37,1 (Tinggi)	344.958.128	37,1 (Tinggi)	344.958.128	37,5 (Tinggi)	344.958.128	37,5 (Tinggi)	344.958.128	37,5 (Tinggi)	344.958.128	
	Persentase Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang memiliki IKM Baik	100%		100%		100%		100%		100%		
	Nilai RB General	71,00		72,00		73,00		74,00		75,00		
	Nilai Rata-rata SAKIP Perangkat Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja	12,56		12,77		12,98		13,19		13,40		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,55		91,58		91,61		91,64		91,67		
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	81.165.531	2 Dokumen	81.165.531	2 Dokumen	81.165.531	2 Dokumen	81.165.531	2 Dokumen	81.165.531	

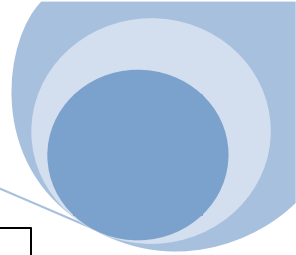


Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan (Inovasi Pelayan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	83.126.284	4 Laporan (Inovasi Pelayan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	83.126.284	4 Laporan (Inovasi Pelayan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	83.126.284	4 Laporan (Inovasi Pelayan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	83.126.284	4 Laporan (Inovasi Pelayan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	83.126.284	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	80.666.313	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	80.666.313	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	80.666.313	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	80.666.313	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	80.666.313	
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan	100	1.425.000.000	100	1.425.000.000	100	1.425.000.000	100	1.425.000.000	100	1.425.000.000	
	Persentase Kegiatan Dokumentasi Pimpinan yang dilaksanakan	100		100		100		100		100		
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	

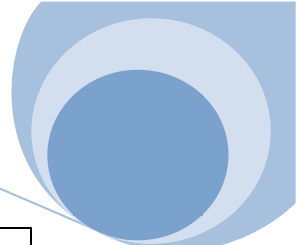


Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	
<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Efektifitas Kerjasama Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.010.037.923</b>	<b>100%</b>	<b>4.340.037.923</b>	<b>100%</b>	<b>4.540.037.923</b>	<b>100%</b>	<b>4.610.037.923</b>	<b>100%</b>	<b>4.910.037.923</b>	
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100%		100%		100%		100%		100%		
	Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	90%		90%		90%		90%		90%		
Administrasi Tata Pemerintahan	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	250.000.000	100%	265.000.000	100%	280.000.000	100%	295.000.000	100%	310.000.000	
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	185.000.000	3 Dokumen	190.000.000	3 Dokumen	195.000.000	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	205.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	90%	3.335.037.923	90%	3.575.037.923	90%	3.695.037.923	90%	3.695.037.923	90%	3.895.037.923	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	1.256.000.000	1	1.356.000.000	1	1.386.000.000	1	1.396.000.000	1	1.486.000.000	



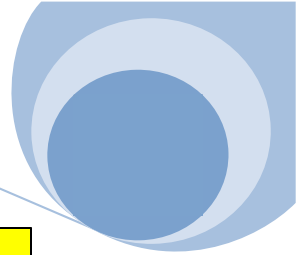


Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	38	1.426.000.000	40	1.526.000.000	41	1.586.000.000	43	1.566.000.000	45	1.686.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3	653.037.923	3	693.037.923	3	723.037.923	3	733.037.923	3	723.037.923	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Pemerintah Daerah	90%	380.000.000	90%	450.000.000	90%	510.000.000	90%	560.000.000	90%	640.000.000	
	Persentase Nagari Binaan Sadar Hukum	15%		19%		22%		25%		28%		
	Persentase Produk Hukum Daerah yang dihasilkan	90%		90%		90%		90%		90%		

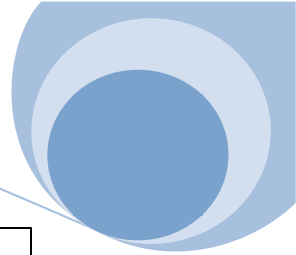


Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	150.000.000	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	180.000.000	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	200.000.000	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	220.000.000	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	250.000.000	
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum	180.000.000	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum	200.000.000	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum	210.000.000	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum	220.000.000	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum	250.000.000	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	50 Buku LD dan 5 Buku BD	50.000.000	50 Buku LD dan 5 Buku BD	70.000.000	50 Buku LD dan 5 Buku BD	100.000.000	50 Buku LD dan 5 Buku BD	120.000.000	50 Buku LD dan 5 Buku BD	140.000.000	
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Efektifitas Kerja Sama Daerah	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	
	Persentase Kerjasama wajib yang dilaksanakan	52%		54%		56%		58%		60%		
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	27 Dokumen	45.000.000	29 Dokumen	50.000.000	31 Dokumen	55.000.000	33 Dokumen	60.000.000	35 Dokumen	65.000.000	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	80%	1.416.921.150	82%	1.683.920.550	85%	1.631.920.550	87%	1.743.920.550	90%	1.865.920.550	
	Tingkat Kematangan UKPBJ	40 / proaktif		40 / proaktif		40 / proaktif		40 / proaktif		40 / proaktif		
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	80		81		82		83		84		
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	80%	265.000.000	82%	430.000.000	85%	305.000.000	87%	360.000.000	90%	390.000.000	
	Total Kredit/PDRB (%)	21%		22%		23%		24%		25,15%		

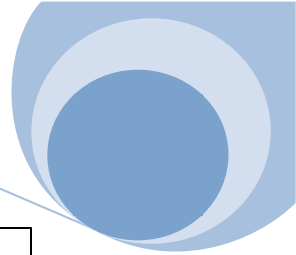




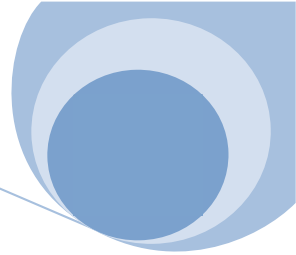
	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	9,44		12,44		15,44		18,44		20,46	
	Nilai Transaksi Saham Perkapita Per Provinsi (Rupiah)	636327		736327		836327		936327		1136327	
	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0,45		0,47		0,49		0,50		0,52	
	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	3,95		4,10		4,25		4,40		4,50	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Peraturan Daerah tentang pendirian BUMD	100.000.000	1 Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, 2 Data Kebijakan Dokumen yang diolah	250.000.000	2 Dokumen data kebijakan BLUD dan BUMD yang diolah	120.000.000	2 Dokumen data kebijakan BLUD dan BUMD yang diolah	150.000.000	2 Dokumen data kebijakan BLUD dan BUMD yang diolah	170.000.000
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % ± 1	80.000.000	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % ± 1	85.000.000	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % ± 2	90.000.000	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % ± 2	105.000.000	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % ± 2	110.000.000
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	85.000.000	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	95.000.000	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	95.000.000	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	105.000.000	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	110.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD			1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Efektifitas kebijakan Administrasi Pembangunan	80%	270.000.000	82%	277.000.000	85%	285.000.000	87%	293.000.000	90%	300.000.000



Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6 kali	150.000.000	6 kali	155.000.000	6 kali	160.000.000	6 kali	165.000.000	6 kali	170.000.000	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	13 Laporan	70.000.000	13 Laporan	72.000.000	13 Laporan	75.000.000	13 Laporan	78.000.000	13 Laporan	80.000.000	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	40	746.921.150	40	836.920.550	40	896.920.550	40	940.920.550	40	1.020.920.550	
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	79,05%		80%		81%		82%		83%		
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	100.131.600	2 Dokumen	120.131.000	2 Dokumen	150.131.000	2 Dokumen	170.131.000	2 Dokumen	200.131.000	
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	546.192.150	1 Dokumen	596.192.150	1 Dokumen	596.192.150	1 Dokumen	600.192.150	1 Dokumen	620.192.150	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 orang	100.597.400	150 orang	120.597.400	150 orang	150.597.400	150 orang	170.597.400	150 orang	200.597.400	
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	100%	135.000.000	100%	140.000.000	100%	145.000.000	100%	150.000.000	100%	155.000.000	



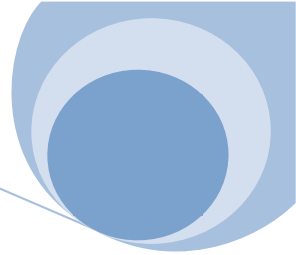
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
			33.851.587.049		34.893.676.881		35.450.851.431		35.927.851.431		40.028.901.481	



**Tabel 4.3**

**Daftar Sub Kegiatan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

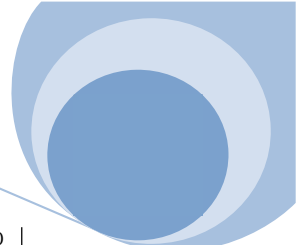
<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja terhadap evaluasi AKIP	Penataan Organisasi	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Administrasi Tata Pemerintahan	
		Efektifitas Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama Daerah	
		Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	
		Tingkat Kematangan UKPBJ	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	



**Tabel 4.4**

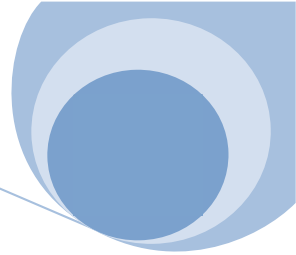
**Dukungan Pelaksanaan Program Pro Rakyat**

No.	PRO RAKYAT	RENCANA AKSI	TARGET						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Melaksanakan MTQ Tingkat Nasional	Melakukan Pembinaan dalam Perlombaan MTQ Tingkat Nasional	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.086.422.955	1.256.000.000	1.356.000.000	1.386.000.000	1.396.000.000	1.486.000.000
2	Dalam rangka Fasilitasi keberangkatan Jemaah Haji	Melakukan Fasilitasi Keberangkatan Jemaah Haji untuk Kab. Pesisir Selatan	150 Orang	250 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1.316.343.280	1.426.000.000	1.526.000.000	1.586.000.000	1.566.000.000	1.686.000.000
3	Bantuan Hibah Mesjid	Memberikan Bantuan Kepada Mesjid dan Mushala	35	38	40	41	43	45	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial						
4	Bantuan Honor untuk Guru TPA dan Imam Mesjid Akbar Baiturahman dan Mesjid Terapung Samudera Illahi	Memberikan Bantuan Honor untuk Guru TPA dan Imam Mesjid Akbar Baiturahman dan Mesjid Terapung Samudera Illahi	2 Mesjid	2 Mesjid	2 Mesjid	2 Mesjid	2 Mesjid	2 Mesjid	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	553.037.923	653.037.923	693.037.923	723.037.923	733.037.923	723.037.923
5	Bantuan Operasional Mesjid Akbar Baiturahman dan Mesjid Terapung Samudera Illahi	Memberikan Bantuan Operasional Mesjid Akbar Baiturahman dan Mesjid Terapung Samudera Illahi	2 Mesjid	2 Mesjid	2 Mesjid	2 Mesjid	2 Mesjid	2 Mesjid	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat						



6	Dalam rangka Pengendalian inflasi	Menjaga Pengendalian Inflasi Daerah	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % ± 1	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % ± 1	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % ± 1	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % ± 2	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % ± 2	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % ± 2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	41.954.466	80.000.000	85.000.000	90.000.000	105.000.000	110.000.000
7	Dalam rangka menjaga Kestabilan Harga Pangan dan Pasokan Pangan	Menjaga Stok Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	44.000.000	85.000.000	95.000.000	95.000.000	105.000.000	110.000.000
8	Dalam rangka Monitoring ketersediaan GAS LPG Subsidi 3 Kg	Menjaga ketersediaan GAS LPG Subsidi 3 kg bagi Masyarakat Miskin	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000



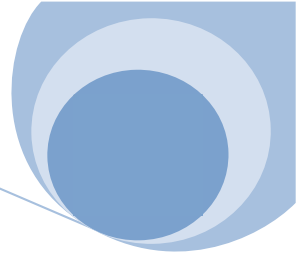


## 4. 2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

### 4.2.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

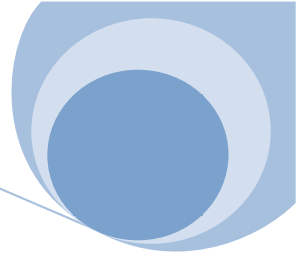
**TABEL 4.5**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH**

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai EPPD	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri	1,865	2,625	2,700	2,800	2,900	3,000	3,100	Sekretariat Daerah
2	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	11,40	11,50	11,80	12,00	12,20	12,40	12,60	Sekretariat Daerah
3	Persentase Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang mencapai Target	Jumlah Persentase Capaian Kinerja OPD yg mencapai target $\frac{\text{Jumlah OPD yang mencapai target}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	97,45%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	Sekretariat Daerah
4	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat	77,12 (BB)	80 (A)	81 (A)	82 (A)	83 (A)	84 (A)	85 (A)	Sekretariat Daerah
5	Nilai Kematangan Inovasi Setda	$KOD = \frac{TNPD}{JPD}$ KOD = Kematangan Organisasi Daerah TNPD = Total Nilai Perangkat Daerah JPD = Jumlah Perangkat Daerah	90	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah



**TABEL 4.6**  
**INDIKATOR KINERJA KUNCI SEKRETARIAT DAERAH (IKK)**  
**4.2.2 Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>A</b>	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
1	Nilai EPPD	Nilai	2,625	2,700	2,800	2,900	3,000	3,100	Sekretariat Daerah
2	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persentase	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
3	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persentase	77,5%	80%	80%	82%	85%	85%	Sekretariat Daerah
4	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persentase	38%	40%	42%	45%	45%	50%	Sekretariat Daerah
5	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persentase	5%	10%	10%	10%	10%	10%	Sekretariat Daerah



<b>B</b>	INDIKATOR KINERJA DAERAH								
<b>1</b>	Tingkat Inflasi	2.00-3.00	2.80-3.60	2.71-3.58	2.61-3.53	2.52-3.49	2.42-3.47	2.33-3.43	Sekretariat Daerah
<b>2</b>	Konsumsi Listrik per Kapita	386,86	474,0	518,8	563,6	608,4	653,2	698,0	Sekretariat Daerah
<b>3</b>	Indeks Kerukunan Umat Beragama	69.76-71.00	70.01-71.01	70.23-71.21	70.45-71.41	70.66-71.61	70.88-71.81	71.10-72.01	Sekretariat Daerah
<b>4</b>	Indeks Reformasi Birokrasi	79,48	80,1	80,5	81,0	81,5	82	82,5	Sekretariat Daerah
<b>5</b>	Nilai SAKIP	68,94	70,1	71	75	80,1	80,3	80,4	Sekretariat Daerah
<b>6</b>	Indeks Pelayanan Publik	4,40	4,46	4,47	4,51	4,54	4,56	4,59	Sekretariat Daerah



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk rencana strategis Sekretariat Daerah merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

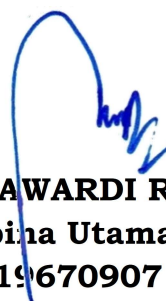
Visi Sekretariat Daerah sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2029, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Dinas/Badan/lembaga Perangkat Daerah. Rencana strategis Sekretariat Daerah akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi. Demikian semoga Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2029 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

**Painan,**

**2025**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**MAWARDI ROSKA, S.IP**  
**Pembina Utama Madya – IV/d**  
**NIP. 19670907 198902 1 001**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON II SEKRETARIAT DAERAH**

	BASELINE	TARGET						BAGIAN TERKAIT	FORMULASI
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1 Nilai EPPD	1,865	2,625	2,700	2,800	2,900	3,000	3,100	TAPEM	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri
2 Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja	11,40	11,60	11,80	12,00	12,20	12,40	12,60	ORGANISASI	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3 Persentase Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang mencapai Target	97,45%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	ORGANISASI	Jumlah Persentase Capaian Kinerja OPD yg mencapai target $\frac{\text{Jumlah OPD yang mencapai target}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
4 Nilai AKIP Sekretariat Daerah	77,12 (BB)	80 (A)	81 (A)	82 (A)	83 (A)	84 (A)	85 (A)	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitasp Setda oleh Inspektorat
5 Nilai Kematangan Inovasi Setda	90	100	100	100	100	100	100	KEUANGAN	Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah

**INDIKATOR KINERJA ESELON III SEKRETARIAT DAERAH**

	BASELINE	TARGET						BAGIAN TERKAIT	FORMULASI
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1 Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Pemerintah Daerah	85%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	HUKUM	$\frac{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Pemerintah Daerah yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Total Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Pemerintah Daerah}} \times 100\%$
2 Persentase Nagari Binaan Sadar Hukum	5%	10%	15%	19%	22%	25%	28%	HUKUM	Jumlah Nagari Binaan Sadar Hukum yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah
3 Persentase Produk Hukum Daerah yang dihasilkan	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	HUKUM	$\frac{\text{Jumlah Produk Hukum Daerah yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Total Produk Hukum Daerah}} \times 100\%$
4 Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	KESRA	$\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat}}{\text{Jumlah Total Pelaksanaan Kebijakan Kesra}} \times 100\%$
5 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TAPEM	Laporan Wajib yang harus dilaksanakan (LPPD, LKPj dan Laporan SPM)
6 Efektifitas Kerjasama Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TAPEM	Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain atau dengan Pihak Ketiga yang ditindaklanjuti

7	Persentase Kerjasama wajib yang dilaksanakan	45	50	52	54	56	58	60	TAPEM	$\frac{\text{Jumlah Kerja Sama yang ditandatangani}}{\text{Jumlah Target Kerja Sama}} \times 100\%$
8	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	79,04	79,05	80	81	82	83	84	PBJ	Hasil Penilaian LKPP RI
9	Tingkat Kematangan UKPBJ	40 / proaktif	40 / proaktif	40 / proaktif	40 / proaktif	40 / proaktif	40 / proaktif	40 / proaktif	PBJ	Hasil Penilaian Kapabilitas UKPBJ dalam Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa oleh LKPP RI
10	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	70%	75%	80%	82%	85%	87%	90%	PEREKONOMIAN	$\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan}}{\text{Jumlah Total Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan}} \times 100\%$
11	Total Kredit/PDRB (%)		19,81%	21,00%	22%	23%	24%	25,15%	PEREKONOMIAN	$\frac{\text{Total Kredit Per Kabupaten}}{\text{PDRB}} \times 100\%$
12	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)		6,44	9,44	12,44	15,44	18,44	20,46	PEREKONOMIAN	$\frac{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$
13	Nilai Transaksi Saham Perkapita Per Provinsi (Rupiah)		567.119	636.327	736.327	836.327	936.327	1.136.327	PEREKONOMIAN	$\frac{\text{Nilai Transaksi Saham Per Kabupaten selama setahun}}{\text{Jumlah Penduduk Per Kabupaten}} \times 100\%$
14	Return on Aset (ROA) BUMD (%)		0,43	0,45	0,47	0,49	0,50	0,52	PEREKONOMIAN	$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$
15	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)		3,86	3,95	4,10	4,25	4,40	4,50	PEREKONOMIAN	$IKAD_m = \left( \sum_{i=1}^{14} a_i z_{tm} \right) \times 10$
16	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	65%	75%	80%	82%	85%	87%	90%	PEMBANGUNAN	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Kebijakan Administrasi Pembangunan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$
17	Nilai RB General	69,38	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	ORGANISASI	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
18	Nilai Rata-rata SAKIP Perangkat Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja	12,14	12,35	12,56	12,77	12,98	13,19	13,40	ORGANISASI	$\frac{\text{Total Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$

19	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	NA	37,1 (Tinggi)	37,1 (Tinggi)	37,5 (Tinggi)	37,5 (Tinggi)	37,5 (Tinggi)	38 (Tinggi)	ORGANISASI	KOD = <u>TNPD</u> JPD KOD = Kematangan Organisasi Daerah TNPD = Total Nilai Perangkat Daerah JPD = Jumlah Perangkat Daerah
20	Persentase Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang memiliki IKM Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ORGANISASI	Jumlah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah $\frac{\text{Jumlah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$
21	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,49	91,52	91,55	91,58	91,61	91,64	91,67	ORGANISASI	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
22	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PROKOPIM	Jumlah Layanan Keprotokolan $\frac{\text{Jumlah Layanan Keprotokolan}}{\text{Jumlah keseluruhan layanan keprotokolan}} \times 100\%$
23	Persentase Kegiatan Dokumentasi Pimpinan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PROKOPIM	Jumlah Kegiatan Dokumentasi Pimpinan yang dilaksanakan $\frac{\text{Jumlah Kegiatan Dokumentasi Pimpinan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah keseluruhan Kegiatan Dokumentasi Pimpinan}} \times 100\%$
24	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	UMUM	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP terpenuhi $\frac{\text{Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP terpenuhi}}{\text{Jumlah Kebutuhan Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP}} \times 100\%$
25	Persentase Layanan Surat menyurat sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	UMUM	Jumlah Layanan Surat menyurat sesuai SOP terpenuhi $\frac{\text{Jumlah Layanan Surat menyurat sesuai SOP terpenuhi}}{\text{Total Kebutuhan Layanan Surat menyurat sesuai SOP}} \times 100\%$
26	Persentase Layanan Sarana dan Prasarana sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	UMUM	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana sesuai SOP terpenuhi $\frac{\text{Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana sesuai SOP terpenuhi}}{\text{Total Kebutuhan Layanan Sarana dan Prasarana sesuai SOP}} \times 100\%$
27	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KEUANGAN	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi yang lengkap $\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi yang lengkap}}{\text{Jumlah Total Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi}} \times 100\%$
28	Ketepatan waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KEUANGAN	Ketepatan waktu Penyampaian Laporan sesuai Permintaan Instansi Terkait

#### INDIKATOR KINERJA DAERAH

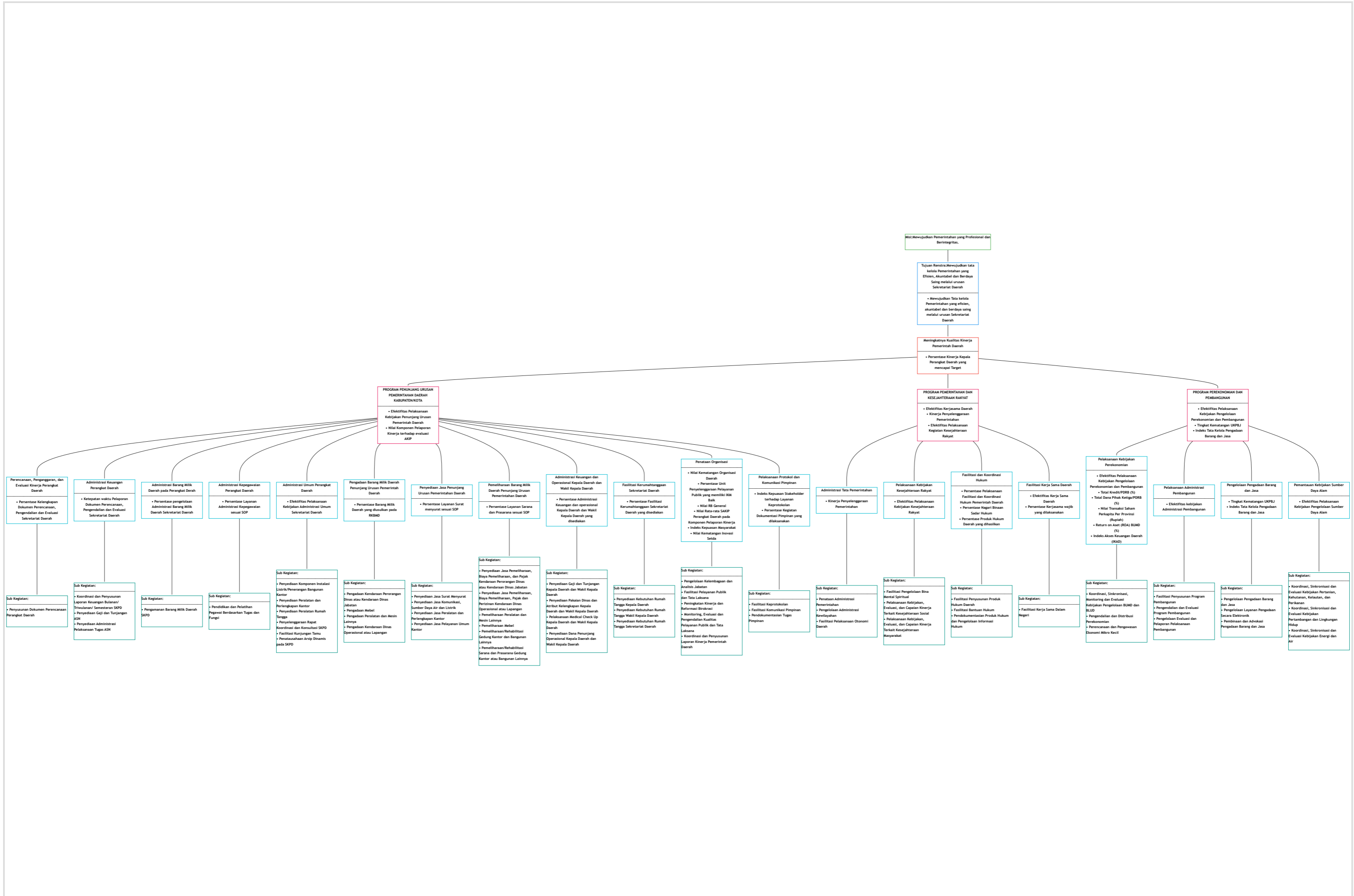
	INDIKATOR KINERJA DAERAH	BASELINE						TARGET						BAGIAN TERKAIT	FORMULASI
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030			
1	Tingkat Inflasi	2.00-3.00	2.80-3.60	2.71-3.58	2.61-3.53	2.52-3.49	2.42-3.47	2.33-3.43	PEREKONOMIAN DAN SDA	Tingkat Inflasi	$\frac{HKt - HKt - 1}{HKt - 1} \times 100\%$				
2	Konsumsi Listrik per Kapita	386,86	474,0	518,8	563,6	608,4	653,2	698,0	PEREKONOMIAN DAN SDA	$KLpk = \frac{KLpln + KLnonpln}{P}$					

3 Indeks Reformasi Birokrasi

79,48	80,1	80,5	81	81,5	82	82,5	ORGANISASI	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
68,94	70,1	71	75	80,1	80,3	80,4	ORGANISASI	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4,40	4,46	4,47	4,51	4,54	4,56	4,59	ORGANISASI	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

4 Nilai SAKIP

5 Indeks Pelayanan Publik



- SEKRETARIAT DAERAH

["KOMINFO-04"] - ["Meningkatkan budaya digital dan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah"]

1 OPD

12 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

["DISPARPORA-05 - ["Meningkatnya Kualitas Destinasi dan Layanan Pariwisata serta Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Inovatif"]

1 OPD

15 - DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

["KOMINFO-02"] - ["Meningkatkan keamanan informasi digital"]

1 OPD

12 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TUJUAN							
Indikator	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang efisien, akuntabel dan berdaya saing melalui urusan Sekretariat Daerah	1,865	2,625	2,700	2,800	2,900	3,000	3,100
SASARAN ESELON II							
Indikator	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang mencapai Target	97,45%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja	11,40	11,50	11,80	12,00	12,20	12,40	12,60
SASARAN ESELON III							
Indikator	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nilai Komponen Pelaporan Kinerja terhadap evaluasi AKIP	11,40	11,40	11,60	11,80	12,00	12,20	12,40
Efektifitas Kerjasama Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	75%	75%	75%	80%	82%	85%	87%
Tingkat Kematangan UKPBJ	40 / proaktif	40 / proaktif	40 / proaktif	40 / proaktif	40 / proaktif	40 / proaktif	40 / proaktif
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	79,04	79,05	80	81	82	83	84
KEGIATAN							
Indikator	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030